

COVER DEPAN

Daftar Isi

DAFTAR TABEL

**PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

NERACA

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

BAB I PENDAHULUAN

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Serta adanya perubahan terhadap Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal bidang kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Berkaitan dengan pertanggungjelasn penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*, *Neraca*, *Laporan Operasional (LO)*, *Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)* dan *Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)*.

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 antara lain merupakan sarana pertanggungjelasn pengelolaan keuangan selama TA 2022 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi:

- Informasi mengenai apakah penerimaan perioda berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran dan telah sesuai dengan alokasi/ anggaran sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Laporan Realisasi Anggaran).
- Informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan beserta hasil-hasilnya (Laporan Operasional).
- Informasi tentang perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan (Laporan Perubahan Ekuitas).
- Informasi tentang besarnya kekayaan dan kewajiban yang timbul pada saat kegiatan berakhir (Neraca).

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang APBD TA. 2021;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD TA. 2022;
16. Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/7094/997-IV/Keu tentang Revisi Pengelolaan Persediaan.
17. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/10552/2821-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Awal Tahun Anggaran 2023 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD

- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pendapatan LO
 - 5.1.4. Beban LO
 - 5.1.5. Aset
 - 5.1.6. Kewajiban
 - 5.1.7. Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTIAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan Publikasi Data Inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur di berandanya¹, dapat diketahui bahwa tingkat inflasi kumulatif tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,31. Tingkat inflasi ini sedikit melampaui tingkat inflasi nasional yang hanya sebesar 3,13. Tingginya tingkat inflasi ini tidak terlepas dari belum stabilnya perekonomian di Indonesia serta dampak Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Keadaan ekonomi makro ini cukup membebani kinerja SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai representatif dari pengaplikasian misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan visinya.

Ekonomi makro yang kurang menguntungkan ini dapat berkorelasi negatif dengan capaian pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga tetap berupaya agar terwujudnya visi dan misi pemerintah, hal ini berimplikasi pula dengan adanya tambahan dana yang dapat dialokasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk melayani masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah hal tersebut tercermin dengan adanya perubahan APBD. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 173.882.085.158,00 dari anggaran murninya yaitu sebesar Rp 356.426.382.872,00 atau mengalami peningkatan anggaran belanja sebesar 67,21%. Anggaran tersebut diharapkan dapat memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat dan menunjang kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target. Adapun perubahan anggaran yang dilakukan dapat disajikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1 Alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2022

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
1.1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	203.583.152.671,65	179.617.383.106,35	383.200.535.778,00

¹ <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/kaltim/Default.aspx>

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
1.1	01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1.036.500.000,00	0	1.036.500.000,00
1.1	01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	533.600.000,00	0	533.600.000,00
1.1	01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	502.900.000,00	0	502.900.000,00
1.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	159.680.257.817,83	(77.655,83)	159.680.180.162,00
1.1	02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	155.787.296.917,83	(77.655,83)	155.787.219.262,00
1.1	02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.217.073.900,00	0	3.217.073.900,00
1.1	02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	284.543.000,00	0	284.543.000,00
1.1	02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	391.344.000,00	0	391.344.000,00
1.1	03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	389.944.000,00	0	389.944.000,00
1.1	03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	9.582.000,00	0	9.582.000,00
1.1	03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	161.580.000,00	0	161.580.000,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
1.1	03	5	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	86.682.000,00	0	86.682.000,00
1.1	03	6	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	132.100.000,00	0	132.100.000,00
1.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.378.600.000,00	0	2.378.600.000,00
1.1	05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.581.138.000,00	0	1.581.138.000,00
1.1	05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	9.0342.000,00	0	9.0342.000,00
1.1	05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	597.740.000,00	0	597.740.000,00
1.1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	109.380.000,00	0	109.380.000,00
1.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.058.241.816,96	73.004,04	9.058.314.821,00
1.1	06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	227.800.035,06	(1,06)	227.800.034,00
1.1	06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.351.521.787,00	0	2.351.521.787,00
1.1	06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	342.988.000,00	73.000,00	343.061.000,00
1.1	06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	328.592.128,00	0	328.592.128,00
1.1	06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	455.589.366,90	5,10	455.589.372,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
1.1	06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.200.000,00	0	19.200.000,00
1.1	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.332.550.500,00	0	5.332.550.500,00
1.1	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	5.642.705.674,00	179.358.848.378,00	185.001.554.052,00
1.1	07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	2.442.462.136,00	2.442.462.136,00
1.1	07	5	Pengadaan Mebel	972.359.000,00	65.360.000,00	1.037.719.000,00
1.1	07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.253.501.000,00	174.000.403.122,00	177.253.904.122,00
1.1	07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0	782.953.000,00	782.953.000,00
1.1	07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	515.811.400,00	311.835.300,00	827.646.700,00
1.1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	260.654.010,00	839.670.310,00	1.100.324.320,00
1.1	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	640.380.264,00	916.164.510,00	1.556.544.774,00
1.1	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	16.078.220.792,18	180.435.243,82	16.258.656.036,00
1.1	08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	71.384.500,00	0	71.384.760,00
1.1	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.890.080.776,00	180.434.984,00	3.070.515.760,00
1.1	08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.235.000,00	20.235.000,00	0

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
1.1	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.096.520.516,18	(0,18)	13.096.520.516,00
1.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	9.318.682.570,68	78.104.136,32	9.396.786.707,00
1.1	09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	263.992.800,00	78.100.000,00	342.092.800,00
1.1	09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.195.848.050,00	0	5.195.848.050,00
1.1	09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	929.236.500,00	0	929.236.500,00
1.1	09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.442.219.746,00	0	1.442.219.746,00
1.1	09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	850.942.505,00	0	850.942.505,00
1.1	09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	636.442.969,68	4.136,32	636.447.106,00
3.1			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	114.617.627.192,75	(2.607.686.518,75)	112.009.940.674,00
3.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan</i>	21.198.116.422,80	(3.220.538.049,80)	17.977.578.373,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			
3.1	01	1	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	917.050.000,00	(917.050.000,00)	0
3.1	01	2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	632.720.000,00	1.033.677.000,00	1.666.397.000,00
3.1	01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	19.648.346.422,80	(3.337.165.049,80)	16.311.181.373,00
3.1	02		Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	4.717.462.300,00	2.230.483.600,00	6.947.945.900,00
3.1	02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	4.717.462.300,00	2.230.483.600,00	6.947.945.900,00
3.1	03		Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	6.933.247.150,00	702.592.200,00	7.635.839.350,00
3.1	03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	756.840.000,00	452.505.600,00	1.209.345.600,00
3.1	03	2	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	951.328.000,00	56.970.000,00	1.008.298.000,00
3.1	03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin	2.929.589.000,00	328.140.000,00	3.257.729.000,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi			
3.1	03	8	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	637.217.000,00	(117.800.000,00)	519.417.000,00
3.1	03	9	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1.658.273.150,00	(17.223.400,00)	1.641.049.750,00
3.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	43.787.703.620,00	(7.267.915.880,00)	36.519.787.740,00
3.1	04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	605.400.000,00	969.828.000,00	1.575.228.000,00
3.1	04	2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	26.705.548.620,00	(26.705.548.620)	0
3.1	04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	6.479.225.000,00	19.510.559.240,00	25.989.784.240,00
3.1	04	6	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	7.260.565.000,00	(7.260.565.000,00)	0
3.1	04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2.736.965.000,00	6.217.810.500,00	8.954.775.500,00
3.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	34.848.363.699,95	(1.274.375.328,95)	33.573.988.371,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
3.1	05	1	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	1.524.143.450,00	(143.755.000,00)	1.380.388.450,00
3.1	05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	981.642.000,00	0	981.642.000,00
3.1	05	3	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	52.146.000,00	0	52.146.000,00
3.1	05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	7.906.613.400,00	272.669.000,00	8.179.282.400,00
3.1	05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	24.383.818.849,95	(1.403.289.328,95)	22.980.529.521,00
3.1	06		<i>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</i>	<i>687.373.000,00</i>	<i>4.463.591.000,00</i>	<i>5.150.964.000,00</i>
3.1	06	1	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	225.505.000,00	(114.356.000,00)	111.149.000,00
3.1	06	3	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	461.868.000,00	4.577.947.000,00	5.039.815.000,00
3.1	07		<i>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun</i>	<i>368.961.000,00</i>	<i>122.550.000,00</i>	<i>491.511.000,00</i>
3.1	07	2	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil	273.681.000,00	217.830.000,00	491.511.000,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			
3.1	07	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	95.280.000,00	(95.280.000,00)	0
3.1	09		Perbenihan Tanaman Hutan	2.076.400.000,00	1.635.925.940,00	3.712.325.940,00
3.1	09	1	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	708.739.000,00	1.493.300.940,00	2.202.039.940,00
3.1	09	2	Sertifikasi Sumber Benih	662.400.000,00	(68.875.000,00)	593.525.000,00
3.1	09	5	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	705.261.000,00	211.500.000,00	916.761.000,00
4.1			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN	5.245.812.350,00	(3.564.281.600,00)	1.681.530.750,00
4.1	01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	4.481.736.100,00	(3.564.281.600,00)	917.454.500,00
4.1	01	1	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	856.414.850,00	(378.359.850,00)	478.055.000,00
4.1	01	2	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	348.385.000,00	(348.385.000,00)	0
4.1	01	3	Pengawetan	145.704.500,00	0	145.704.500,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi			
4.1	01	5	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	2.753.282.200,00	(2.753.282.200,00)	0
4.1	01	8	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi	271.385.000,00	22.310.000,00	293.695.000,00
4.1	01	9	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	106.564.550,00	(106.564.550,00)	0
4.1	03		<i>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</i>	764.076.250,00	0	764.076.250,00
4.1	03	4	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	51.700.000,00	0	51.700.000,00
4.1	03	5	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	712.376.250,00	0	712.376.250,00
5.1			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	31.547.115.657,60	(515.709.329,60)	31.031.406.328,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
5.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	31.547.115.657,60	(515.709.329,60)	31.031.406.328,00
5.1	01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	12.851.387.600,00	(396.032.000,00)	12.455.355.600,00
5.1	01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	9.552.402.032,60	(4.755.408.449,60)	4.796.993.583,00
5.1	01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	9.143.326.025,00	4.635.731.120,00	13.779.057.145,00
6.1			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1.432.675.000,00	952.379.500,00	2.385.054.500,00
6.1	01		<i>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	1.432.675.000,00	952.379.500,00	2.385.054.500,00
6.1	01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	453.697.000,00	0	453.697.000,00
6.1	01	2	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	327.720.000,00	952.379.500,00	1.280.099.500,00
6.1	01	4	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	567.239.600,00	0	567.239.600,00
6.1	01	6	Peningkatan	84.018.400,00	0	84.018.400,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS			

Nomenklatur Program dan Kegiatan yang disajikan diatas didasarkan pada Permendagri No. 90 Tahun 2019. Pada tahun 2022 Dinas Kehutanan memiliki 5 program dan 20 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Hutan
 - Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
 - Kegiatan Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
 - Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
 - Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
 - Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
 - Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
 - Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan
3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
 - Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

4. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
5. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
 - Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.2 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efisien dan akuntabilitas (pertanggungjawaban). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset non tunai dan aset tunai/ kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumberdaya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi pendapatan pada tahun ini adalah sebesar Rp. 50.650.000,00, nilai ini tidak tercapai dari targetnya sebesar Rp. 150.000.000 atau hanya memperoleh 33,77 % dari target. Bila dibandingkan, maka dapat diketahui terjadi kenaikan sebesar Rp. 50.650.000,00 atau sebesar 100% dari realisasi pendapatan tahun lalu. Realisasi belanja pada tahun ini adalah sebesar Rp 194.066.542.771,00, nilai ini tidak mencapai target sebesar Rp 336.241.925.259,00 atau hanya tercapai sebesar 36,60 % dari target. Bila dibandingkan pada tahun lalu maka dapat diketahui terjadi penurunan realisasi sebesar Rp 159.919.371.744,69 atau menurun sebesar 45,18 % dari realisasi belanja tahun lalu. Adapun penjelasan atas kenaikan/penurunan pendapatan dan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
Dinas Kehutanan						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	383.200.535.778,00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %
<i>01.1</i>	<i>01</i>		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>1.036.500.000,00</i>	<i>Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>70 Nilai AKIP</i>
01.1	01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	533.600.000,00	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran	8 dokumen
01.1	01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	502.900.000,00	Tersedianya Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen dan 3 laporan
<i>01.1</i>	<i>02</i>		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>159.680.180.162,00</i>	<i>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	155.787.219.262,00	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.217.073.900,00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
01.1	02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	284.543.000,00	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	1 laporan
01.1	02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	391.344.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	16 laporan
<i>001.1</i>	<i>03</i>		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>389.944.000,00</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan LBMD pada SKPD kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>8 laporan</i>
01.1	03	004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	161.580.000,00	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD	1 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	86.682.000,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	4 laporan
01.1	03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	132.100.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	1 laporan
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.378.600.000,00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	147 stel
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.581.138.000,00	Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	147 stel
01.1	05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	109.380.000,00	Jumlah Bimtek / Pelatihan	12 orang
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.058.314.821,00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.351.521.787,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	343.061.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	455.589.372,00	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	47223 lembar
01.1	06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.200.000,00	Jumlah Bulan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.332.550.500,00	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254 orang
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	185.001.554.052,00	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	70 unit
001.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	177.253.904.122,00	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.258.656.036,00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
01.1	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	71.384.760,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.070.515.760,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan	13.096.520.516,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Umum Kantor		Pelayanan Umum Kantor	
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	9.396.786.707,00	<i>Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	19 unit
01.1	09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	342.092.800,00	Jumlah unit kendaraan jabatan yang dipelihara	6 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.195.848.050,00	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	40 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	929.236.500,00	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 bulan
01.1	09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	850.942.505,00	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi	2 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	112.009.940.674,00	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	5.000.000 M3 dan 7,5 Ton
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	6.947.945.900,00	<i>Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disahkan</i>	19 RPHJP
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	6.947.945.900,00	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1 RPHJP dan 19 RPHJpd
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	7.635.839.350,00	<i>Terlaksananya pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola</i>	1611386 Ha
03.1	03	001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	1.209.345.600,00	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	9 dokumen
03.1	03	002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	1.008.298.000,00	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	2 dokumen
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	3.257.729.000,00	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	59 laporan
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	36.519.787.740,00	<i>Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara yang</i>	730 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					<i>ditanam dan dipelihara</i>	
03.1	04	001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	1.575.228.000,00	Jumlah Dokumen RTnRL yang disusun	1 dokumen
03.1	04	002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	550 Ha
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	25.989.784.240,00	Luas Penghijauan Lingkungan yang ditanam dan dipelihara	180 Ha
03.1	04	008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	8.954.775.500,00	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	23 laporan
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	33.573.988.371,00	<i>Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani</i>	6 kasus
03.1	05	001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	1.380.388.450,00	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	2 laporan
03.1	05	003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	52.146.000,00	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	1 laporan
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8.179.282.400,00	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	22.980.529.521,00	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	7 laporan
03.1	07		<i>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun</i>	491.511.000,00	<i>Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun</i>	15 unit manajemen
03.1	07	002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	491.511.000,00	Jumlah Laporan Pembinaan pada Industri dan TPKO	24 laporan
03.1	09		<i>Perbenihan Tanaman Hutan</i>	3.712.325.940,00	<i>Jumlah Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan/atau Bibit Terdaftar, Sertifikat Sumber Benih dan Laporan</i>	126 Pertek, SFT,Lap
03.1	09	001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	2.202.039.940,00	Jumlah Pertimbangan Teknis Pengadaan dan Pengedaran benih/bibit terdaftar yang diterbitkan dan Laporan	26 Pertek, SFT,Lap

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					kegiatan Sosialisasi Perbenihan Tanaman Hutan	
03.1	09	002	Sertifikasi Sumber Benih	593.525.000,00	Jumlah Sertifikat Sumber Benih Yang Diterbitkan	20 sertifikat
03.1	09	005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	916.761.000,00	Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit dan Laporan Kegiatan Bimtek	80 laporan
04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.681.530.750,00	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1,25 %
04.1	03		<i>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</i>	<i>764.076.250,00</i>	<i>Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang dikelola</i>	<i>6000 Ha</i>
04.1	03	005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	712.376.250,00	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di KBEP	21 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	31.031.406.328,00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
05.01	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>31.031.406.328,00</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>15 laporan</i>
05.01	01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	12.455.355.600,00	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Dibidang Kehutanan	15 kegiatan
05.01	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	4.796.993.583,00	- Penilaian Kelas KTH - Lomba Wana Lestari (Pengelola PS)	- 5 unit - 4 unit
05.01	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	13.779.057.145,00	22 Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan & HA	35000 Ha
06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH	2.385.054.500,00	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	13 %

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			ALIRAN SUNGAI (DAS)			
06.1	01		<i>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	2.385.054.500,00	<i>Jumlah laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>17 laporan</i>
06.1	01	002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	1.280.099.500,00	DAS/SUB DAS yang dimonitoring	6 laporan
06.1	01	004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	567.239.600,00	Jumlah Laporan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS	6 laporan
06.1	01	006	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	84.018.400,00	Jumlah Laporan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	4 laporan
UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.753.654.500,00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83%
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>126.960.000,00</i>	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	126.960.000,00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>182.910.000,00</i>	<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	182.910.000,00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	152 stel
01.1	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>192.026.700,00</i>	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.052.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.720.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan
01.1	06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.737.000,00	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.837.700,00	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan
01.1	06	006		3.840.000,00	Jumlah Bulan Penyediaan	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.840.000,00	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	161.030.000,00	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	1 unit
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.030.000,00	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	767.092.000,00	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.386.000,00	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	12 bulan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	615.706.000,00	Tersedianya Jasa Tenaga Non ASN	169 orang
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.635.800,00	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	14 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	228.841.800,00	Jumlah unit yang mendapatkan pajak perijinan	10 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.550.000,00	Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 unit
01.1	09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.244.000,00	Jumlah unit pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.767.022.000,00	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5000000 M3 dan 7,5 Ton
03.1	02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	197.387.000,00	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1 dokumen
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	197.387.000,00	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1 dokumen
04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN	917.454.500,00	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	≤ 1,5%

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target
			EKOSISTEMNYA		
04.1	01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	917.454.500,00	Luas kawasan hutan TAHURA yang dikelola 64864 Ha
04.1	01	001	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	478.055.000,00	Jumlah laporan pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan kawasan TAHURA 36 laporan
04.1	01	002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	0	Jumlah laporan tindak pengamanan kawasan TAHURA 12 laporan
04.1	01	003	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	145.704.500,00	Jumlah Laporan Unit Pengawetan Tumbuhan, Satwa, Serta Habitat Tahura 10 laporan
04.1	01	005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	0	Jumlah Laporan Pemulihan Fungsi kosistem/Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan Tahura 12 laporan
04.1	01	008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	293.695.000,00	Jumlah Laporan Kemitraan Konservasi Masyarakat Di Sekitar Kawasan TAHURA 5 laporan
04.1	01	009	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	0	Jumlah Laporan Pengelolaan Daerah Penyangga Tahura 12 laporan
04.1	03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	0	Luas KBEP yang dikelola 972 Ha
04.01	03	004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	0	Jumlah Dokumen Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 0 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	828.615.000,00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha) 32000 Ha
05.1	01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	828.615.000,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Kehutanan 8 laporan
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	Jumlah Ekonomi Produktif Pada KTH/KUPS 2 KTH/KUPS
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	828.615.000,00	Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan 100 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Kehutanan dan HA	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.716.202.200,00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %
<i>01.1</i>	<i>02</i>		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>133.080.000,00</i>	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	133.080.000,00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
<i>01.1</i>	<i>05</i>		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>79.200.000,00</i>	<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66.000.000,00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	30 stell
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.200.000,00	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	10 orang
<i>01.1</i>	<i>06</i>		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>321.461.400,00</i>	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.671.700,00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.975.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan
01.1	06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.912.700,00	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.152.000,00	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan
01.1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.750.000,00	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan
<i>01.1</i>	<i>07</i>		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>76.590.000,00</i>	<i>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	<i>12 Unit</i>
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.590.000,00	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit
<i>01.1</i>	<i>08</i>		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>432.093.344,00</i>	<i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.894.760,00		12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.721.400,00	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	326.477.184,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	673.777.456,00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	30 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.120.000,00	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	30 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.940.000,00	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 bulan
01.1	09	009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit
01.1	09	011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	490.717.456,00	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	5.068.010.000,00	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5000000 M3 dan 7,5 Ton
03.1	01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.021.391.000,00	Terlaksananya Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan provinsi	3 dokumen
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.021.391.000,00	Jumlah laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2 laporan
03.1	02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	464.333.800,00	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1 dokumen
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	464.333.800,00	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1 dokumen
03.1	03		Pemanfaatan Hutan di	207.520.000,00	Luas areal pemanfaatan hutan	110790 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			<i>Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>		<i>di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola</i>	
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	207.520.000,00	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	12 unit manajemen
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	1.578.055.700,00	<i>Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara</i>	50 Ha
03.1	04	002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1.289.335.700,00	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	100 Ha
03.1	04	008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	288.720.000,00	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	8 laporan
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	1.796.709.500,00	<i>Jumlah Tindak Pidana yang ditangani</i>	3 kasus
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	144.970.000,00	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	6 laporan
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	472.519.500,00	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.179.220.000,00	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	11 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	454.480.000,00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>454.480.000,00</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>9 laporan</i>
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	185.020.000,00	Jumlah Ekonomi Produktif Pada KTH/KUPS	3 KTH/KUPS
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan	269.460.000,00	Jumlah usulan permohonan HD, HKm, HTR, dan Kemitraan	3000 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Perhutanan Sosial		kehutanan	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.201.071.100,00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %
<i>01.1</i>	<i>02</i>		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>138.720.000,00</i>	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	138.720.000,00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
<i>01.1</i>	<i>05</i>		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>120.375.000,00</i>	<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90.375.000,00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya	95 stell
01.1	05	009	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000,00	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 orang
<i>01.1</i>	<i>06</i>		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>648.245.435,00</i>	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.215.250,00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	353.180.185,00	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.000.000,00	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.500.000,00	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.350.000,00	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan
<i>01.1</i>	<i>08</i>		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>722.396.665,00</i>	<i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.500.000,00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550 lembar
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.505.761,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan	564.390.904,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Umum Kantor		Pelayanan Umum Kantor	
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	571.334.000,00	<i>Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	<i>29 Unit</i>
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	373.498.000,00	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	33 Unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147.862.000,00	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 bulan
01.1	09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.150.000	Jumlah unit pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2 Unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4.769.800.000,00	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5000000 M3 dan 7,5 Ton
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	<i>478.007.000,00</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	478.007.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3 laporan
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	<i>276.800.000,00</i>	<i>Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	276.800.000,00	Jumlah Dokumen RPH yang tersusun	2 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	<i>144.400.000,00</i>	<i>Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola</i>	<i>93859 Ha</i>
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	144.400.000,00	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	4 Unit Manajemen
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	<i>1.200.725.000,00</i>	<i>Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara</i>	<i>100 Ha</i>
03.1	04	006	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	1.200.725.000,00	Jumlah laporan pengembangan perbenihan untuk kegiatan RHL	2 laporan
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan</i>	<i>2.548.768.000,00</i>	<i>Jumlah Tindak Pidana yang</i>	<i>2 kasus</i>

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			<i>Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>		<i>ditangani</i>	
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	50.400.000,00	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	4 laporan
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	404.400.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	14 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.093.968.000,00	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	35 laporan
03.1	06		<i>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</i>	<i>121.100.000,00</i>	<i>Jumlah Pengawasan pada Unit Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu</i>	<i>1 unit</i>
03.1	06	003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	121.100.000,00	Jumlah Unit Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	1 unit
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	583.000.000,00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>583.000.000,00</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</i>	<i>3 laporan</i>
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	225.650.000,00	Jumlah Ekonomi Produktif pada KTH / KUPS	2 KTH/KUPS
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	357.350.000,00	Jumlah Unit Usaha Kelompok PS	2 Unit
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.028.849.300,00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>129.000.000,00</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	129.000.000,00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	37.610.000,00	<i>Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya</i>	<i>39 stell</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37.610.000,00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	39 stell
01.1	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	309.270.481,00	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.214.500,00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan
01.01	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.767.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan
01.01	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.826.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan
01.1	06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan
01.01	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.478.981,00	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan
01.01	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.984.000,00	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan
01.1	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	590.486.639,00	<i>Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>25 unit</i>
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.840.000,00	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit
01.1	07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	521.646.639,00	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit
01.1	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	525.476.180,00	<i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.240.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.008.300,00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Komunikasi, Sumber Daya Air	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					dan Listrik	
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	411.227.880,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	437.006.000,00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	28 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	283.386.000,00	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	42 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.620.000,00	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 bulan
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	5.249.288.000,00	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5000000 M3 dan 7,5 Ton
03.1	01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	540.497.000,00	Jumlah laporan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana operasionalisasi KPH	8 laporan
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	540.497.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH	8 laporan
03.1	02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	1.141.169.500,00	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1 dokumen
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1.141.169.500,00	Jumlah Dokumen yang sudah disusun	1 dokumen
03.1	03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	97.316.000,00	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang dikendalikan	5 Unit Manajemen
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	97.316.000,00	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	5 Unit Manajemen
03.1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.024.983.500,00	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	50 Ha
03.1	04	002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	3.024.983.500,00	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	470 Ha
03.1	04	008	Pembinaan dan/atau	0	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka	0 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		pengembangan rehabilitasi lahan	
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	445.322.000,00	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	12 laporan
03.1	05	001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	180.240.000,00	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	8 laporan
03.1	05	002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	107.372.000,00	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	1 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	157.710.000,00	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	4 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	125.400.000,00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
05.1	05		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	125.400.000,00	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 laporan
05.1	05	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	125.400.000,00	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	2 kegiatan
05.1	05	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	Jumlah Ekonomi Produktif pada KTH/KUPS	6 KTH/KUPS
05.1	05	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	0 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.942.154.000,00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %
01.1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	131.640.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi	131.640.000,00	Jumlah Bulan Penyediaan	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Pelaksanaan Tugas ASN		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.600.000,00	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39.600.000,00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	44 stell
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.554.876,00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.010.752,00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.230.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.418.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.976.124,00	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan
01.1	06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	1.920.000,00	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.000.000,00	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	274.316.000,00	Jumlah Pengadaan Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20 unit
01.1	07	005	Pengadaan Mebel	74.580.000,00	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	31 unit
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.736.000,00	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	775.138.624,00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
01.1	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.461.200,00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	663.927.424,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	436.904.500,00	<i>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah</i>	20 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211.787.000,00	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	31 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.730.000,00	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 bulan
01.1	09	009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.387.500,00	Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4.940.200.000,00	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5000000 M3 dan 7,5 Ton
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	1.664.279.350,00	<i>Produksi Hutan Non Kayu</i>	10 ton
03.1	01	002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	132.720.000,00	Jumlah Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 blok
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.531.559.350,00	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1 Laporan
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	310.043.150,00	<i>Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang Dapat Dikelola</i>	20 Ha
03.1	03	009	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	310.043.150,00	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1 kegiatan
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	1.487.603.500,00	<i>Jumlah Luas dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	50 Ha
03.1	04	002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	998.745.000,00	Jumlah Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	50 Ha
03.1	04	006	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	488.858.500,00	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	1 laporan
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan</i>	912.001.000,00	<i>Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani</i>	1 Tindak Pidana

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target
			Hutan Produksi		
03.1	05	001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	76.560.000,00	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan 1 laporan
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	249.996.000,00	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan 1 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	585.445.000,00	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 1 laporan
03.1	06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	566.273.000,00	Jumlah Pengawasan Pada Unit Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 1 Unit
03.1	06	001	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	225.505.000,00	Jumlah Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati 1 unit
03.1	06	003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	340.768.000,00	Jumlah Unit Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 1 unit
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	439.080.000,00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha) 32000 Ha
05	01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	439.080.000,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 2 laporan
05.1	01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	339.180.000,00	Jumlah KTH/KUPS terregistrasi 10 KTH
05.1	01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	99.900.000,00	Luas Usaha Permohonan HD, HKM, HTR, kemitraan Kehutanan dan HA 20 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan					
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.765.409.000,00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan 83 %
01.1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	131.640.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah 12 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	131.640.000,00	Jumlah bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	230.300.000,00	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	166.500.000,00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	150 stell
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63.800.000,00	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	10 orang
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	475.673.576,00	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.784.000,00	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.465.076,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.151.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.023.500,00	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264.250.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	604.424.424,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.040.200,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	496.384.224,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.371.000,00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	46 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	323.371.000,00	Jumlah Unit Penyediaan Jasa	92 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	5.319.550.000,00	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5000000 M3 dan 7,5 Ton
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	170.302.250,00	<i>Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	170.302.250,00	Jumlah Pelaksanaan Operasional KPH	12 bulan
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	359.400.000,00	<i>Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola</i>	<i>267068 Ha</i>
03.1	03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	275.400.000,00	Jumlah laporan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	5 dokumen
03.1	03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	84.000.000,00	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	11 Unit Manajemen
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	<i>3.279.355.750,00</i>	<i>Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara</i>	<i>100 Ha</i>
03.1	04	002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	422.444.250,00	Luas Hutan Rakyat yang ditanam	100 Ha
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	167.541.000,00	Luas Penghijauan Lingkungan yang ditanam	5 Ha
03.1	04	006	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	2.689.370.500,00	Jumlah luasan pemeliharaan tanaman	1 laporan
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	<i>1.510.492.000,00</i>	<i>Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani</i>	<i>2 kasus</i>
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	84.000.000,00	Jumlah laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	4 laporan
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	432.292.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
03.1	05	006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	994.200.000,00	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	5 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	293.850.000,00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
<i>05.1</i>	<i>01</i>		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>293.850.000,00</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>5 laporan</i>
05.1	01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	150.720.000,00	Jumlah Ekonomi Produktif Pada KTH/KUPS	3 KTH/KUPS
05.1	01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	143.130.000,00	Jumlah lokasi kegiatan sosialisasi	2 lokasi
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.392.866.000,00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %
<i>01.1</i>	<i>02</i>		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>123.600.000,00</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	123.600.000,00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
<i>01.1</i>	<i>05</i>		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>88.920.000,00</i>	<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	88.920.000,00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	117 stell
<i>01.1</i>	<i>06</i>		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>566.556.180,00</i>	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.071.580,00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	321.890.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Perlengkapan Kantor	
01.1	06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.000.000,00	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.194.600,00	Jumlah bulan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.400.000,00	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan
01.1	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	179.345.000,00	<i>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	35 unit
01.1	07	005	Pengadaan Mebel	179.345.000,00	Jumlah unit pengadaan Mebel	35 unit
01.1	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	731.049.820,00	<i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	12 bulan
01.1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.706.560,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
01.1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.343.260,00	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	703.395.000,00	<i>Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>	112 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	257.272.000,00	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	53 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.780.000,00	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 bulan
01.1	09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	385.343.000,00	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4.384.492.817,00	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5000000 M3 dan 7,5 Ton
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	649.564.817,00	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH</i>	1 dokumen
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	649.564.817,00	Jumlah laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	343.450.000,00	<i>Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	<i>2 dokumen</i>
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	343.450.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan yang Sudah Disusun	1 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	633.490.000,00	<i>Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola</i>	<i>272566 Ha</i>
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	49.700.000,00	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	3 Unit Manajemen
03.1	03	009	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	583.790.000,00	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan / atau Jasa Lingkungan	2 Kegiatan
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	1.276.345.000,00	<i>Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara</i>	<i>100 Ha</i>
03.1	04	001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	Jumlah Dokumen RTnRL yang disusun	1 dokumen
03.1	04	002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	746.745.000,00	Luas Hutan Rakyat Yang Ditanam	50 Hektar
03.1	04	006	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	529.600.000,00	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	1 laporan
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	1.481.643.000,00	<i>Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani</i>	<i>36 kasus</i>
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	49.510.000,00	Jumlah Laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	3 laporan
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	387.290.000,00	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	3 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.044.843.000,00	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penangulangan kebakaran hutan dan lahan	3 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN	884.717.183,00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	884.717.183,00	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>172 laporan</i>
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	532.447.183,00	Jumlah ekonomi produktif pada KTH/KUPS	2 KTH/KUPS
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	352.270.000,00	Luas usaha permohonan HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	2000 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.843.255.500,00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>124.200.000,00</i>	<i>Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.200.000,00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>125.750.000</i>	<i>Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya</i>	<i>40 stell</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.950.000	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	40 stell
01.1	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>363.685.156,00</i>	<i>Jumlah Bulan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan, dll</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.945.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.571.600,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan
01.1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.568.556,00	Jumlah Bulan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan
01.1	06	09	Penyelenggaraan Rapat	226.600.000,00	Jumlah Bulan Penyelenggaraan	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
01.1	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	471.031.600,00	<i>Jumlah Unit Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor, dll</i>	1 unit
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.513.000,00	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26 unit
01.1	07	009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	317.518.600,00	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit
01.1	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	493.946.544,00	<i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	12 bulan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.790.800,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.155.744,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	322.392.200,00	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	33 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	322.392.200,00	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	33 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4.504.220.900,00	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5000000 M3 dan 7,5 Ton
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	343.782.900,00	<i>Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH</i>	1 dokumen
03.1	01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	343.782.900,00	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1 laporan
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	0	<i>Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH</i>	1 dokumen
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan</i>	145.450.000,00	<i>Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di</i>	4 Unit Manajemen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			<i>Hutan Lindung</i>		<i>Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan</i>	
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	145.450.000,00	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	4 Unit Manajemen
03.1	03	008	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	0	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Hutan di KPH	4 kegiatan
03.1	03	009	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	0	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1 kegiatan
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	1.928.840.000,00	<i>Jumlah Bibit Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	3500 bibit
03.1	04	001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	Jumlah Dokumen RTnRL yang disusun	1 dokumen
03.1	04	002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1.574.240.000,00	Luas Hutan Rakyat yang ditanam	100 Ha
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	354.600.000,00	Jumlah Bibit Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3500 bibit
03.1	04	008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	0	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	2 laporan
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	2.086.148.000,00	<i>Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan</i>	6 laporan
03.1	05	001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	408.000.000,00	Jumlah Lokasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	10 lokasi
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	141.200.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.536.948.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	6 laporan
03.1	06		<i>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</i>	0	<i>Jumlah Pengawasan pada Unit Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu</i>	1 unit
03.1	06	001	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	0	Jumlah Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	1 unit
03.1	07		<i>Pelaksanaan Pengolahan Hasil</i>	0	<i>Jumlah Pembinaan dan</i>	4 Unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			<i>Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun</i>		<i>Pemenuhan Komitmen pada unit pengelolaan hasil hutan kayu</i>	<i>Manajemen</i>
03.1	07	002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	0	Jumlah Unit Manajemen Industri yang dilakukan pembinaan	4 Unit Manajemen
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	952.429.100,00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
<i>05.1</i>	<i>01</i>		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>952.429.100,00</i>	<i>Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan</i>	<i>2 kegiatan</i>
05.1	01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	135.600.000,00	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	2 kegiatan
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	606.973.000,00	Jumlah Ekonomi Produktif pada KTH/KUPS	4 KTH/KUPS
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	209.856.100,00	Luas Usulan Permohonan HA, HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	500 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.941.860.400,00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %
<i>01.1</i>	<i>02</i>		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>144.702.000,00</i>	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	126.960.000,00	Jumlah Bulan Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
01.1	02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17.742.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	9 laporan
<i>01.1</i>	<i>03</i>		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>18.924.000,00</i>	<i>Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	03	003	Koordinasi dan Penilaian	9.582.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi dan	3 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Barang Milik Daerah SKPD		Penilaian Barang Milik Daerah	
01.1	03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.342.000,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan LBMD Pada SKPD	2 laporan
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.732.000,00	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 laporan
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.430.000,00	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33 stell
01.1	05	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	19.302.000,00	Jumlah Laporan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	5 laporan
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	397.682.552,00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.303.152,00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.640.000,00	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.469.400,00	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	258.270.000,00	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	42 laporan
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	875.781.048,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.158.800,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	700.622.248,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.038.800,00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	27 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	302.911.000,00	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	12 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan	132.127.800,00	Jumlah bulan pemeliharaan	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Mesin Lainnya		mesin dan peralatan lainnya	
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4.129.182.000,00	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5000000 M3 dan 7,5 Ton
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	664.491.000,00	<i>Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	664.491.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1 buku
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	408.783.000,00	<i>Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	<i>4 dokumen</i>
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	408.783.000,00	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	183.150.000,00	<i>Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola</i>	<i>69911 Ha</i>
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	183.150.000,00	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	17 laporan
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	904.595.000,00	<i>Luas rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	<i>100 Hektar</i>
03.1	04	002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	816.050.000,00	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	20 Ha
03.1	04	008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	88.545.000,00	Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	2 laporan
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	1.968.163.000,00	<i>Jumlah Tindak Pidana yang ditangani</i>	<i>2 kasus</i>
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	610.260.000,00	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan	13 lokasi
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan	1.357.903.000,00	Jumlah Sosialisasi Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	10 lokasi

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Kebakaran Hutan dan Lahan			
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.281.208.000,00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>1.281.208.000,00</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</i>	<i>13 laporan</i>
05.1	01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	57.240.000,00	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	13 laporan
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	858.113.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Kerja/Pengelolaan PS	5 dokumen
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	365.855.000,00	Jumlah Sosialisasi Tingkat Tapak	5 lokasi
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.952.653.800,00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>124.800.000,00</i>	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.800.000,00	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>50.550.000,00</i>	<i>Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.750.000,00	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	27 stell
01.1	02	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.800.000,00	Jumlah ASN dan Staf mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5 orang
01.1	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>334.187.994,00</i>	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.356.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan	102.094.750,00	Jumlah bulan pelaksanaan	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.872.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan
01.1	06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.188.000,00	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.557.244,00	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.120.000,00	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan
01.1	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	188.144.750,00	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	9 unit
01.1	07	005	Pengadaan Mebel	88.963.000,00	Jumlah unit Pengadaan Mebel	19 unit
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.232.000,00	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit
01.1	07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.949.750,00	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit
01.1	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	690.379.920,00	<i>Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan
01.1	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.700.400,00	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
01.1	08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	Jumlah bulan pelaksanaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	619.679.520,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17 orang
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	564.591.136,00	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	19 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	196.869.000,00	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	18 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.850.000,00	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 bulan
01.1	09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.872.136,00	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4.882.116.400,00	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5000000 M3 dan 7 Ton
<i>03.1</i>	<i>01</i>		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	<i>1.040.379.900,00</i>	<i>Terlaksananya Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	01	002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	Jumlah Laporan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 laporan
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.040.379.900,00	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	5 Laporan / paket
<i>03.1</i>	<i>02</i>		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	<i>163.020.000,00</i>	<i>Tersusunnya dokumen RPHJP/Revisi RPHJP /dokumen perencanaan lainnya</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	163.020.000,00	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1 dokumen
<i>03.1</i>	<i>03</i>		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	238.140.000,00	Terlaksananya pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	312160 Ha
03.1	03	001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	141.240.000,00	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	1 dokumen
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	96.900.000,00	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	1 dokumen
<i>03.1</i>	<i>04</i>		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	<i>1.840.666.000,00</i>	<i>Terlaksananya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	<i>60 Ha</i>
03.1	04	002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1.591.766.000,00	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	50 Ha
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan	248.900.000,00	Luas Penghijauan Lingkungan yang ditanam dan dipelihara	10 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Hutan Negara			
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	1.599.910.500,00	<i>Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi</i>	2 kasus
03.1	05	001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	309.080.000,00	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	20 laporan
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	144.628.400,00	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.146.202.100,00	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penangulangan kebakaran hutan dan lahan	70 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	529.412.000,00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	529.412.000,00	<i>Terlaksananya pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	3 laporan
05.1	01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	278.732.000,00	Jumlah Ekonomi Produktif Pada KTH/KUPS	3 KTH/KUPS
05.1	01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	250.680.000,00	Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	250 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.770.972.200,00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	150.713.900,00	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	12 laporan
01.1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150.713.900,00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	128.325.000,00	<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i>	12 laporan
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52.725.000,00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	41 stell
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan	75.600.000,00	Jumlah Pegawai mengikuti	6 orang

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.568.000,00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.268.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.300.000,00	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.410.800,00	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	46 unit
01.1	07	005	Pengadaan Mebel	85.291.000,00	Jumlah unit Pengadaan Mebel	27 unit
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	248.827.000,00	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 unit
01.1	07	009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.292.800,00	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621.667.500,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.754.700,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
01.1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	530.912.800,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.287.000,00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.287.000,00	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	11 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4.885.102.000,00	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5000000 M3 dan 7,5 Ton
03.1	01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	463.823.000,00	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 dokumen
03.1	01	001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan	197.880.000,00	Jumlah Dokumen Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Pengelolaan Hutan		KPH	
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	265.943.000,00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH yang di sediakan dan pemeliharaannya	1 unit
03.1	02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	408.480.000,00	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1 dokumen
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	408.480.000,00	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1 dokumen
03.1	03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	152.760.000,00	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	301650 Ha
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	88.320.000,00	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	6 UM
03.1	03	009	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	64.440.000,00	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	6 kegiatan
03.1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1.510.810.000,00	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	25 hektar
03.1	04	001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	Jumlah Dokumen RTnRL yang disusun	1 dokumen
03.1	04	002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	841.675.000,00	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	25 hektar
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	266.855.000,00	Luas Penghijauan Lingkungan yang ditanam dan dipelihara	2 hektar
03.1	04	006	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	402.280.000,00	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	2 laporan
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2.253.949.000,00	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	2 kasus
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	167.460.000,00	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	8 laporan
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	559.111.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan	12 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Hutan		Perlindungan Hutan	
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.527.378.000,00	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penangulangan kebakaran hutan dan lahan	24 laporan
03.1	06		<i>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</i>	0	<i>Jumlah Unit Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya</i>	<i>1 unit</i>
03.1	06	003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	0	Jumlah Unit Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	1 unit
03.1	07		<i>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun</i>	<i>95.280.000,00</i>	<i>Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun</i>	<i>1 Unit Manajemen</i>
03.1	07	003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	95.280.000,00	Jumlah Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di Fasilitasi Pemenuhan Komitmen melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 UM
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	605.118.000,00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>605.118.000,00</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>4 laporan</i>
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	242.280.000,00	Jumlah Ekonomi Produktif pada KTH/KUPS	3 KTH
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	362.838.000,00	Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	100 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.688.862.200,00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan</i>	<i>134.880.000,00</i>	<i>Jumlah laporan keuangan</i>	<i>12 laporan</i>

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			<i>Perangkat Daerah</i>		<i>perangkat daerah</i>	
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	134.880.000,00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	61.110.000,00	<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i>	12 laporan
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31.110.000,00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	34 stell
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	8 orang
01.1	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	293.032.902,00	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.501.000,00	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.531.902,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan
01.1	06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan
01.1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.000.000,00	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan
01.1	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	448.084.010,00	<i>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	42 unit
01.1	07	005	Pengadaan Mebel	39.253.000,00	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	6 unit
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.177.000,00	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28 unit
01.1	07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	260.654.010,00	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit
01.1	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	577.797.288,00	<i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	12 bulan
01.1	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.100.400,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.235.000,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	452.461.888,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	173.958.000,00	<i>Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	12 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	173.958.000,00	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	11 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4.273.800.000,00	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5000000 M3 dan 7,5 Ton
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	1.161.002.400,00	<i>Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH</i>	1 dokumen
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.161.002.400,00	Jumlah laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3 laporan
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	373.920.000,00	<i>Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	1 dokumen
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	373.920.000,00	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun Hutan	2 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	100.800.000,00	<i>Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola</i>	132335 Ha
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	100.800.000,00	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	6 Unit Managemen
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	683.550.000,00	<i>Luas rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	20 Ha
03.1	04	001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	Jumlah Dokumen RTnRL yang disusun	1 dokumen
03.1	04	002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	683.550.000,00	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	25 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
03.1	04	006	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	1 laporan
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.954.527.600,00	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	2 kasus
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	114.630.000,00	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	8 laporan
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	805.310.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	50 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.034.587.600,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	50 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.246.330.000,00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
05.1	01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.246.330.000,00	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	5 laporan
05.1	01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	90.000.000,00	Jumlah Kegiatan atau Pelatihan Peningkatan Kapastitas Penyuluh	12 Kegiatan
05.1	01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	134.700.000,00	Jumlah ekonomi produktif pada KTH/KUPS	6 KTH/KUPS
05.1	01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.021.630.000,00	Jumlah Unit Usaha Kelompok Pehutanan Sosial	3 unit
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.458.459.500,00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %
01.1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	134.880.000,00	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 laporan
01.1	01	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	134.880.000,00	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					ASN	
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98.400.000,00	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 laporan
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69.000.000,00	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	23 stell
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.400.000,00	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	16 orang
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	367.467.816,00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.151.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan komponen listrik atau penerangan bangunan kantor	12 bulan
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.498.100,00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan, peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan
01.1	06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.818.716,00	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan
01.1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.000.000,00	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	696.952.684,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.403.580,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
01.1	08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan peralatan rumah tangga	0 bulan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	536.549.104,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.759.000,00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	27 unit
01.1	09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	0	Jumlah unit kendaraan jabatan yang dipelihara	0 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	160.759.000,00	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	27 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	0 bulan
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4.719.455.976,00	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5000000 M3 dan 7 Ton
<i>03.1</i>	<i>01</i>		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	<i>736.976.976,00</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	736.976.976,00	Jumlah laporan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH	1 laporan
<i>03.1</i>	<i>02</i>		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	<i>241.856.000,00</i>	<i>Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	241.856.000,00	Jumlah dokumen RPH yang sudah disusun	1 dokumen
<i>03.1</i>	<i>04</i>		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	<i>1.790.443.000,00</i>	<i>Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara</i>	<i>50 Ha</i>
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.790.443.000,00	Luas penghijauan lingkungan yang ditanam dan dipelihara	50 Ha
<i>03.1</i>	<i>05</i>		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	<i>1.950.180.000,00</i>	<i>Jumlah Tindak Pidana yang ditangani</i>	<i>1 kasus</i>
03.1	05	001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	0	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	0 laporan
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	275.390.000,00	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	2 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.674.790.000,00	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penangulangan kebakaran hutan dan lahan	5 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN	969.265.600,00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	969.265.600,00	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</i>	<i>5 laporan</i>
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	788.140.600,00	Jumlah ekonomi produktif pada KTH/KUPS	4 KTH
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	181.125.000,00	Luas Usulan Permohonan HD, KKM, HTR Kemitraan Kehutanan dan HA	2 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.922.819.500,00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>126.960.000,00</i>	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	126.960.000,00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasian Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>152.000.000,00</i>	<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	76.400.000,00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	78 stell
01.1	05	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.400.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan SIK	9 laporan
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.200.000,00	Jumlah Laporan Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 orang
01.1	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>574.933.972,00</i>	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.961.000,00	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.221.000,00	Jumlah Unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.114.000,00	Jumlah Unit Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan
01.1	06	004	Penyediaan Bahan Logistik	46.005.712,00	Jumlah Penyediaan Bahan	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Kantor		Logistik Kantor	
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.345.760,00	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.286.500,00	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	256.000.000,00	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	2 unit
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	256.000.000,00	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit
01.1	07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Jumlah Unit Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	596.232.528,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.840.000,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	445.392.528,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.693.000,00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	22 unit
01.1	09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	186.413.000,00	Jumlah Unit Yang mendapat Pemeliharaan dan mendapatkan Pajak Perijinan	22 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.280.000,00	Jumlah Unit yang dilakukan pemeliharaan	12 bulan
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4.755.138.000,00	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5000000 M3 dan 7,5 Ton
03.1	01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.474.659.000,00	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun	1 dokumen
03.1	01	002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	Jumlah Laporan Pembagian Blok/ Petak Pengelolaan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	22 laporan
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.474.659.000,00	Jumlah Unit Yang disediakan dan di pelihara	5 laporan
03.1	01	004	Koordinasi dan Sinkronisasi	0	Jumlah laporan	13 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target
			Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan		
03.1	03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	411.520.000,00	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola 1 Ha
03.1	03	001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	0	Jumlah dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan hutan produksi 14 dokumen
03.1	03	002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	34.128.000,00	Jumlah dokumen Data dan informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung 1 dokumen
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	159.592.000,00	Jumlah Izin Usaha dan atau kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi 6 Unit Manajemen
03.1	03	008	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	217.800.000,00	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH 17 kegiatan
03.1	03	009	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	0	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa lingkungan 4 kegiatan
03.1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1.427.449.000,00	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara 200 Ha
03.1	04	001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	Jumlah Dokumen RTnRL Yang disusun 4 dokumen
03.1	04	002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara 25 hektar
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.427.449.000,00	Luas Penghijauan Lingkungan yang di tanam 100 hektar
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.441.510.000,00	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani 3 kasus
03.1	05	001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	0	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan 18 laporan
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	94.900.000,00	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan 4 laporan
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	91.760.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 5 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	1.254.850.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 45 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		Pencegahan/penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	
03.1	09		<i>Perbenihan Tanaman Hutan</i>	0	<i>Jumlah sk pengada dan pengedar benih / bibit terdaftar; Sertifikat sumber benih</i>	<i>0 Sk pengada pengedar</i>
03.1	09	001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	0	Jumlah Pengada Pengedar Benih/Bibit terdaftar yang diterbitkan	5 Sk pengada pengedar
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	693.482.000,00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>693.482.000,00</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</i>	<i>8 laporan</i>
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	297.740.000,00	Jumlah ekonomi produktif pada KTH/KUPS	4 KTH/KUPS
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	395.742.000,00	Luas Usulan Permohonan HD, HKm, HTR, kemitraan Kehutanan dan HA	2000 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.368.000.000	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %
01.1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	348.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan
01.1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	348.000.000	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>96.075.000,00</i>	<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>12 Stell/Laporan</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	96.075.000,00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	135 stell
01.1	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>189.014.000,00</i>	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	15.000.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Kantor		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
01.1	06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.514.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.500.000,00	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 OT/bulan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	374.311.000,00	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	35 unit
01.1	07	005	Pengadaan Mebel	47.595.000,00	Jumlah unit pengadaan Mebel	35 unit
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	326.716.000,00	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.032.189.490,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.925.186,00	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	888.264.304,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.250.000	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	15 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.150.000	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	28 Bulan/Unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.100.000	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan/Unit
01.1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.100.000	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4.032.084.000,00	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5000000 M3 dan 7,5 Ton
03.1	01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.000.000.000,00	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 dokumen
03.1	01	001	Penyusunan Rancang Bangun	250.000.000,00	Jumlah Dokumen Penyusunan	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	750.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1 laporan
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	<i>150.000.000,00</i>	<i>Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	150.000.000,00	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	<i>62.550.000,00</i>	<i>Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola</i>	<i>37578 Ijin Usaha/Ha</i>
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	62.550.000,00	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	3 Laporan/Unit Manajemen
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	<i>1.981.046.500,00</i>	<i>Luas rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	<i>100 Ha</i>
03.1	04	002	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	1.265.336.500,00	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	50 Ha
03.1	04	006	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	715.710.000,00	Jumlah laporan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	5 laporan
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	<i>838.487.500,00</i>	<i>Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani</i>	<i>2 kasus</i>
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	0	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	0 laporan
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	239.841.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	598.646.500,00	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	17 laporan
04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN	51.700.000,00	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	50 %

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			EKOSISTEMNYA			
04.1	03		<i>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</i>	51.700.000,00	<i>Luas KBEP yang dikelola</i>	<i>50 Ha</i>
04.1	03	004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	51.700.000,00	Jumlah Laporan Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	1 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.190.466.000,00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	1.190.466.000,00	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>8 laporan</i>
05.1	01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	322.800.000,00	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	1 kegiatan
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	717.666.000,00	Jumlah ekonomi produktif pada KTH/KUPS	1 KTH/KUPS
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	150.000.000,00	Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	300 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.008.929.000,00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	148.800.000,00	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000,00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	131.610.000,00	<i>Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i>	<i>2 laporan</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41.610.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	63 stell
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	90.000.000,00	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Fungsi		Pegawai	
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	479.709.774,00	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.120.100,00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan
01.1	06	002	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	115.686.174,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan
01.1	06	003	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.376.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan
01.1	06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.847.500,00	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	294.680.000,00	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.690.000,00	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24 unit
01.1	07	005	Pengadaan Mebel	50.850.000,00	Jumlah unit Pengadaan Mebel	8 unit
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.840.000,00	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	671.764.576,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.572.400,00	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	572.192.176,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	497.354.650,00	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	367.225.000,00	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	13 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target
			Operasional atau Lapangan		
01.1	09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.129.650,00	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4.592.475.000,00	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton) 5000000 M3 dan 7,5 Ton
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	958.730.750,00	<i>Terlaksananya Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i> 1 dokumen
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	958.730.750,00	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH 1 laporan
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	71.925.000,00	<i>Tersusunnya dokumen RPHJP/Revisi RPHJP /dokumen perencanaan lainnya</i> 1 dokumen
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	71.925.000,00	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun 1 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	253.800.000,00	<i>Terlaksananya pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola</i> 132792 Ha
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	53.800.000,00	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan 7 Unit Manajemen
03.1	03	008	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	0	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Hutan di KPH 5 kegiatan
03.1	03	009	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	200.000.000,00	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan 1 kegiatan
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	2.209.179.250,00	<i>Terlaksananya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i> 123,4 Ha
03.1	04	002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	2.209.179.250,00	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara 123,4 Ha
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	Luas Penghijauan Lingkungan yang ditanam dan dipelihara 3 Ha
03.1	05			1.098.840.000,00	2 kasus

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>		<i>Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi</i>	
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	98.800.000,00	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	13 laporan
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	196.004.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	20 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	804.036.000,00	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	40 laporan
04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	0	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	0 %
<i>04.1</i>	<i>03</i>		<i>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</i>	<i>0</i>	<i>Terlaksananya pengelolaan KBEP</i>	<i>500 Ha</i>
04.1	03	005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	0	Jumlah Laporan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di KBEP	3 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	792.050.000,00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat	32000 Ha
<i>05.1</i>	<i>01</i>		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>792.050.000,00</i>	<i>Terlaksananya pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>2 laporan</i>
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	533.018.000,00	Jumlah ekonomi produktif pada KTH/KUPS	7 KTH/KUPS
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	259.032.000,00	Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	1000 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn						

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.019.824.000,00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>121.560.000,00</i>	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	121.560.000,00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pengadministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>90.230.000,00</i>	<i>Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35.250.000,00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	40 stell
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.980.000,00	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	4 orang
01.1	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>402.673.000,00</i>	<i>Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.040.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.382.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan
01.1	06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0 bulan
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.451.000,00	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224.800.000,00	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan
01.1	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>224.034.875,00</i>	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>66 unit</i>
01.1	07	005	Pengadaan Mebel	124.841.000,00	Jumlah unit Pengadaan Mebel	59 unit
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.410.000,00	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit
01.1	07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	25.783.875,00	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Kantor atau Bangunan Lainnya		atau Bangunan Lainnya	
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	715.526.525,00	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan
01.1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.624.965,00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
01.1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	621.901.560,00	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	465.799.600,00	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	46 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	229.463.000,00	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	17 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.071.000,00	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 bulan
19.01	09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	202.665.600,00	Jumlah Unit Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit
19.01	09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.600.000,00	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4.889.804.000,00	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5000000 M3 dan 7 Ton
03.1	01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.366.858.500,00	Terlaksananya Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1 dokumen
03.1	01	001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	469.170.000,00	Jumlah Dokumen Penyusunan RPHJP dan RPHJPD Kesatuan Pengelolaan Hutan	2 dokumen
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	897.688.500,00	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	5 laporan
03.1	02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi	46.018.000,00	Tersusunnya dokumen Rencana Pengelolaan / dokumen perencanaan lainnya	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			<i>(KPHK)</i>			
03.1	02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	46.018.000,00	Jumlah Dokumen/Peta Rawan Konflik yang sudah disusun	1 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	159.812.000,00	<i>Terlaksananya pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola</i>	85751 Ha
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	94.320.000,00	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	5 Unit Manajemen
03.1	03	008	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	65.492.000,00	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Hutan di KPH	3 Kegiatan
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	1.682.940.000,00	<i>Terlaksananya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	80 Ha
03.1	04	002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1.682.940.000,00	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	80 Ha
03.1	04	006	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	0 laporan
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	1.634.175.500,00	<i>Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi</i>	2 kasus
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	69.600.000,00	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	3 laporan
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	310.147.500,00	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	10 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.254.428.000,00	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penangulangan kebakaran hutan dan lahan	50 laporan
03.1	06		<i>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</i>	0	<i>Jumlah Pengawasan pada Unit Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu</i>	0 unit
03.1	06	003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	0	Jumlah Unit Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	0 unit
05			<i>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN</i>	545.626.000,00	<i>Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)</i>	32000 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
05.1	01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	545.626.000,00	Terlaksananya pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	15 laporan
05.1	01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	61.200.000,00	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	3 kegiatan
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	243.085.000,00	Jumlah Ekonomi Produktif pada KTH/KUPS	3 KTH/KUPS
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	241.341.000,00	Jumlah Unit Usaha Kelompok Perhutanan Sosial	1 unit
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Teluke						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.999.174.000,00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %
01.1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	156.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	126.960.000,00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
01.1	02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	29.040.000,00	Jumlah Bulan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	12 bulan
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111.090.000,00	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.450.000,00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	62 stell
01.1	05	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.640.000,00	Jumlah Laporan koordinasi dan Pelaksanaan SIK	8 laporan
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 orang
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.740.633,00	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi	10.213.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.996.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.916.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.655.633,00	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan
01.1	06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000,00	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.040.000,00	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan
01.1	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>447.594.000,00</i>	<i>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	<i>76 unit</i>
01.1	07	005	Pengadaan Mebel	103.424.000,00	Jumlah unit pengadaan Mebel	18 unit
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	344.170.000,00	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22 unit
01.1	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>811.303.812,00</i>	<i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.052.500,00	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	741.751.312,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>288.445.555,00</i>	<i>Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	<i>26 unit</i>
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.881.000,00	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	26 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.710.000,00	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 bulan
01.1	09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.854.555,00	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit
03			PROGRAM	4.747.275.000,00	Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			PENGELOLAAN HUTAN		dan Non Kayu (Ton)	dan 7 Ton
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	2.393.490.080,00	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2.393.490.080,00	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	4 laporan
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	83.430.000,00	<i>Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola</i>	<i>96298 Ha</i>
03.1	03	008	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	83.430.000,00	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Hutan di KPH	1 kegiatan
03.1	03		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	1.371.996.920,00	<i>Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara</i>	<i>96 Ha</i>
03.1	03	002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1.199.995.420,00	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	96 Ha
03.1	03	006	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	172.001.500,00	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	1 laporan
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	898.358.000,00	<i>Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani</i>	<i>3 kasus</i>
03.1	05	001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	83.430.000,00	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	8 laporan
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	207.584.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	607.344.000,00	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penangulangan kebakaran hutan dan lahan	5 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	579.585.000,00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di</i>	579.585.000,00	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan</i>	<i>3 laporan</i>

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			<i>Bidang Kehutanan</i>		<i>masyarakat di bidang kehutanan</i>	
05.1	01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	100.680.000,00	Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	3 kegiatan
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	310.437.000,00	Jumlah Ekonomi Produktif pada KTH/KUPS	7 KTH/KUPS
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	168.468.000,00	Jumlah Usulan Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	2563 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.988.071.100,00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %
<i>01.1</i>	<i>02</i>		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>174.960.000,00</i>	<i>Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	123.240.000,00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
01.1	02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	51.720.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan
<i>01.1</i>	<i>05</i>		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>118.583.000,00</i>	<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	99.823.000,00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	88 stell
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.760.000,00	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	7 orang
<i>01.1</i>	<i>06</i>		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>446.750.774,00</i>	<i>Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.319.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah	8.000.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
01.1	06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.191.774,00	Jumlah Bulan Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	14517 lembar
01.1	06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	0	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.240.000,00	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan
01.1	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>119.194.000,00</i>	<i>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	<i>31 unit</i>
01.1	07	005	Pengadaan Mebel	85.622.000,00	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	21 unit
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.572.000,00	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit
01.1	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>822.488.326,00</i>	<i>Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159.658.550,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 bulan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	655.329.776,00	Jumlah Bulan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>306.095.000,00</i>	<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>41 unit</i>
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	275.315.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Operasional Yang Dipelihara	31 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.780.000,00	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Lainnya	12 bulan
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	5.244.777.500,00	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5000000 M3 dan 7,5 Ton
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan</i>	<i>3.559.880.500,00</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH</i>	<i>1 dokumen</i>

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			<i>Provinsi</i>			
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3.559.880.500,00	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	6 laporan
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	130.320.000,00	<i>Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disahkan</i>	1 dokumen
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	130.320.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun	3 dokumen
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	1.062.019.500,00	<i>Luas rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	130 Ha
03.1	04	001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	Jumlah Dokumen RTnRL yang disusun	3 dokumen
03.1	04	006	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	1.062.019.500,00	Jumlah laporan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	6 laporan
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	492.557.500,00	<i>Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani</i>	2 kasus
03.1	05	001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	143.755.000,00	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	12 laporan
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	128.880.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	219.922.500,00	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	12 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	174.422.500,00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	174.422.500,00	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	4 laporan
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan	174.422.500,00	Jumlah Ekonomi Produktif Pada KTH/KUPS	2 KTH/KUPS

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	Luas usaha permohonan HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	1400 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS	1.810.279.020,00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %
<i>01.1</i>	<i>02</i>		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>133.440.000,00</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	133.440.000,00	Jumlah bulan pengadministrasian pelaksanaan tugas ASN	12 bulan
<i>01.1</i>	<i>05</i>		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>182.300.000,00</i>	<i>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	62.300.000,00	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	48 stell
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.000.000,00	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	23 orang
<i>01.1</i>	<i>06</i>		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>474.411.800,00</i>	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.230.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.123.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	78.871.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan
01.1	06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.416.000,00	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.371.800,00	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 bulan
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218.400.000,00	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan
<i>01.1</i>	<i>07</i>		<i>Pengadaan Barang Milik</i>	<i>245.279.500,00</i>	<i>Jumlah Unit Pengadaan</i>	<i>19 unit</i>

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			<i>Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
01.1	07	005	Pengadaan Mebel	92.595.000,00	Jumlah unit pengadaan mebel	46 unit
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	152.684.500,00	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	19 unit
01.1	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	563.311.470,00	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan
01.1	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.315.822,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	506.995.648,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	211.536.250,00	<i>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.421.250,00	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	17 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.115.000,00	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 bulan
01.1	09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	5.244.374.700,00	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5000000 M3 dan 7,5 Ton
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	1.510.000.000,00	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan yang Telah Disusun Oleh KPH</i>	2 dokumen
03.1	01	002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	500.000.000,00	Jumlah Dokumen Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (Dokumen RPHJPD dan Dokumen Desain Tapak)	2 dokumen
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.010.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Saprass Oprasional KPH	2 laporan
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan</i>	300.000.000,00	<i>Jumlah Dokumen RPHJP /</i>	2 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			<i>Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>		<i>Revisi RPHJP yang Telah Disahkan</i>	
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	300.000.000,00	Jumlah Dokumen RPH yang Sudah Disusun	2 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	1.270.495.000,00	<i>Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang Dapat Dikelola</i>	25 Ha
03.1	03	002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	500.000.000,00	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	2 dokumen
03.1	03	008	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	270.495.000,00	Jumlah Pemanfaatan Hutan di KPH	4 kegiatan
03.1	03	009	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	500.000.000,00	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan	2 kegiatan
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	950.000.000,00	<i>Luas Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	15 Ha
03.1	04	001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	250.000.000,00	Jumlah Dokumen RTnRL yang Disusun	1 dokumen
03.1	04	002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	500.000.000,00	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	10 Ha
03.1	04	008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	200.000.000,00	Jumlah Laporan Pembinaan dan atau Pengawasan Dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 laporan
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	1.213.879.700,00	<i>Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani</i>	5 kasus
03.1	05	001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	213.879.700,00	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	5 laporan
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	250.000.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	750.000.000,00	Jumlah Sosialisasi Penyadartahuan Pencegahan Karhutla	4 kegiatan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,	400.000.000,00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	400.000.000,00	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>24 laporan</i>
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	300.000.000,00	Jumlah Fasilitasi Pembuatan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial	1 KUPS
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	100.000.000,00	Permohonan HD, HKm, HTR Kemitraan Kehutanan dan HA	1 usaha

Dalam pencapaian target-target tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Dinas dan evaluasi berkala melalui Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalog) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2022 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (01)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp 383.200.535.778,00 pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 121.590.274.126,00 atau 31,73 %. Sedangkan pada tahun 2021 lalu, program ini dianggarkan sebesar Rp 172.387.395.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 131.605.882.269,00 atau 76,34%. Apabila dibandingkan, maka terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp 261.610.261.652,00 namun juga terjadi penurunan realisasi sebesar Rp 10.015.608.143,00. Hal ini terjadi dikarenakan perubahan anggaran yang terjadi di bulan September sehingga waktu tidak mencukupi untuk mencapai target.

- ***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.036.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 881.027.800,00 atau 85 %. Sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.942.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.297.634.740,00 atau 66,79 %. Terjadi penurunan anggaran pada tahun 2022 yakni sebesar Rp 906.300.000,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 416.606.940,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

- ♦ **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 533.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 428.280.300,00 atau 80,26 %. Sedangkan pada tahun 2021, dianggarkan sebesar Rp 1.312.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 823.915.690,00 atau 62,76%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 779.200.000,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 395.635.390,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

- ♦ **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 502.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 452.747.500,00 atau mencapai 90,03%. Sedangkan tahun

2021 dianggarkan sebesar Rp 630.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 473.719.050,00 atau 75,19%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 127.100.000,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 20.971.550,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

➤ ***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 159.680.180.162,00 dan terealisasi sebesar Rp 86.507.762.201,00 atau mencapai 54,18%. Sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 138.092.309.183,00 dan terealisasi sebesar Rp 102.920.472.501,00 atau mencapai 74,53%. Pada tahun ini terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 21.587.870.979,00, namun juga terjadi penurunan realisasi sebesar Rp 16.412.710.300,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

◆ **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 155.787.219.262,00 dan terealisasi sebesar Rp 83.183.817.763,00 atau mencapai 53,40%. Sedangkan pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp 133.717.579.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 99.440.329.524,00 atau 74,37 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 22.069.640.262,00, namun juga terjadi penurunan realisasi sebesar Rp 16.256.511.761,00 pada tahun ini. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

◆ **Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.217.073.900,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.706.115.900,00 atau mencapai 84,12 %. Sedangkan pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp 4.358.410.183,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.463.822.977,00 atau 79,47 %. Terjadi penurunan anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp 1.141.336.283,00 dan juga penurunan realisasi sebesar Rp 757.707.077,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

◆ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 284.543.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 270.954.050,00 atau mencapai 95,22 %. Sub Kegiatan ini

tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tidak ada pada tahun anggaran 2021.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 391.344.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 346.874.488,00 atau mencapai 88,64 %. Sedangkan pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp 16.320.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 16.320.000,00 atau 100 %. Terjadi kenaikan anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp 375.024.000,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 330.554.488,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

➤ ***Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 389.944.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 351.085.660,00 atau mencapai 90,03 %. Sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 178.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 166.184.600,00 atau 93,05 %. Pada tahun ini terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 211.344.000,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 184.901.060,00 dari tahun lalu. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 9.582.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 9.556.000,00 atau mencapai 99,73 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD tidak ada pada tahun anggaran 2021.

♦ **Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 161.580.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 138.528.660,00 atau mencapai 85,73 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 145.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 133.008.400,00 atau 91,73%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 16.580.000,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 5.520.260,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 86.682.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 86.561.000,00 atau mencapai 99,86 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 33.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 33.176.200,00 atau 98,74 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 53.082.000,00 dan juga kenaikan realisasi sebesar Rp 53.384.800,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 132.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 116.440.000,00 atau mencapai 88,15 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD tidak ada pada tahun anggaran 2021.

➤ ***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.378.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.850.546.762,00 atau mencapai 77,80 %. Sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.124.827.043,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.666.549.579,00 atau 78,43 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 253.772.957,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 183.997.183,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.581.138.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.398.199.821,00 atau mencapai 88,43 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.225.020.043,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.060.000.078,00 atau 86,53 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 356.117.957,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 338.199.743,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 90.342.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 88.619.900,00 atau mencapai 98,09 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 191.736.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 153.674.000,00 atau 80,15 %. Terjadi penurunan

anggaran sebesar Rp 101.394.000,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 65.054.100,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

♦ **Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 597.740.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 302.061.217,00 atau mencapai 50,53 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 534.771.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 373.410.313,00 atau 69,83%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 62.969.000,00 namun juga terjadi penurunan realisasi sebesar Rp 71.349.096,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

♦ **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 109.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 61.665.824,00 atau mencapai 56,38 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 152.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 79.465.188,00 atau 51,97 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 43.520.000,00 dan juga penurunan realisasi sebesar Rp 17.799.364,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

➤ ***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 9.058.314.821,00 dan terealisasi sebesar Rp 8.058.774.297,00 atau mencapai 88,97 %. Sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.528.871.772,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.600.885.169,00 atau 87,67 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 1.529.443.049,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 1.457.889.128,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 227.800.034,00 dan terealisasi sebesar Rp 191.721.266,00 atau mencapai 84,16 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 119.471.619 dan

terrealisasi sebesar Rp. 111.103.497 atau 93 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 108.328.415,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 80.617.769,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.351.521.787,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.109.249.040,00 atau mencapai 89,70 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 886.584.387,00 dan terealisasi sebesar Rp 703.264.644,00 atau 79,32 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 1.464.937.400,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 1.405.984.396,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 343.061.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 331.152.200,00 atau mencapai 96,53 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 153.289.800,00 dan terealisasi sebesar Rp 151.711.200,00 atau 98,97 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 189.771.200,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 179.441.000,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 328.592.128,00 dan terealisasi sebesar Rp 292.832.377,00 atau mencapai 89,12 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 421.829.476,00 dan terealisasi sebesar Rp 395.737.395,00 atau 93,81%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 93.237.348,00 dan penurunan anggaran sebesar Rp 102.905.018,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 455.589.372,00 dan terealisasi sebesar Rp 349.014.615,00 atau mencapai 76,61 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 275.449.570,00 dan terealisasi sebesar Rp 214.416.730,00 atau 77,84 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 180.139.802,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 134.597.885,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 19.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 17.870.000,00 atau mencapai 93,07 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 17.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 10.890.000,00 atau 62,16 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 1.680.000,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 6.980.000,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.332.550.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.766.934.799,00 atau mencapai 89,39 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.652.941.920 dan terealisasi sebesar Rp. 5.004.676.703 atau 88,53 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 320.391.420,00 dan juga penurunan realisasi sebesar Rp 237.741.904,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

➤ ***Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 185.001.554.052,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.590.148.387,00 atau mencapai 2,48 %. Sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.347.489.651,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.762.046.264,00 atau 86,53 %. Terjadi kenaikan anggaran pada tahun ini sebesar Rp 180.654.064.401,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 828.102.123,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.442.462.136,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel tidak ada pada tahun anggaran 2021.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Mebel**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.037.719.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 884.945.742,00 atau mencapai 85,28 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 518.757.200,00 dan terealisasi sebesar Rp 469.629.800,00 atau 90,53%. Terjadi kenaikan anggaran

sebesar Rp 518.961.800,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 415.315.942,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 177.253.904.122,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.382.928.199,00 atau mencapai 1,34 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.017.632.951,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.507.893.109,00 atau 83,11 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 174.236.271.171,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 124.964.910,00. Hal ini dikarenakan adanya perubahan anggaran pada bulan September, sehingga waktu tidak mencukupi untuk mencapai target.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 782.953.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 477.543.681,00 atau mencapai 60,99 %. Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 24.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 22.937.700,00 atau 94,01%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 758.553.000,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 454.605.981,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 827.646.700,00 dan terealisasi sebesar Rp 230.611.897,00 atau mencapai 27,86 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 312.107.300,00 dan terealisasi sebesar Rp 309.480.655,00 atau 99,16 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 515.539.400,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 78.868.758,00. Hal ini dikarenakan adanya perubahan anggaran pada bulan September, sehingga waktu tidak mencukupi untuk mencapai target.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.100.324.320,00 dan terealisasi sebesar Rp 251.243.000,00 atau mencapai 22,83 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 240.120.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 229.010.000,00 atau 95,37 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 860.204.320,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 22.233.000,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.556.544.774,00 dan terealisasi sebesar Rp 362.875.868,00 atau mencapai 23,31 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 234.472.200 dan terealisasi sebesar Rp. 223.095.000 atau 95,15 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 1.322.072.574,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 139.780.868,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

► **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 16.258.656.036,00 dan terealisasi sebesar Rp 13.612.002.337,00 atau mencapai 83,72 %. Sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 12.255.247.954,00 dan terealisasi sebesar Rp 10.949.516.461,00 atau 89,35 %. Terjadi kenaikan anggaran pada tahun ini sebesar Rp 4.003.408.082,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 2.662.485.876,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 71.384.760,00 dan terealisasi sebesar Rp 42.352.050,00 atau mencapai 59,33 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 60.575.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 41.794.650,00 atau 69,00 %. Terjadi kenaikan anggaran pada tahun ini sebesar Rp 10.809.760,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 557.400,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.070.515.760,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.014.393.049,00 atau mencapai 65,60 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.591.572.750 dan terealisasi sebesar Rp. 1.728.042.831 atau 66,68 %. Terjadi kenaikan anggaran pada tahun ini sebesar Rp 478.943.010,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 286.350.218,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.235.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.310.000,00 atau mencapai 16,36 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 24.955.000,00 dan

terrealisasi sebesar Rp 4.620.000,00 atau 18,51 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 4.720.000,00 dan juga penurunan realisasi sebesar Rp 1.310.000,00. Hal ini dikarenakan adanya perubahan anggaran pada bulan September, sehingga waktu tidak mencukupi untuk mencapai target.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 13.096.520.516,00 dan terealisasi sebesar Rp 11.551.947.238,00 atau mencapai 88,21 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 9.578.145.204,00 dan terealisasi sebesar Rp 9.175.058.980,00 atau 95,79 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 3.518.375.312,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 2.376.888.258,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

➤ ***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 9.396.786.707,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.738.926.682,00 atau mencapai 61,07 %. Sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.917.249.897,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.242.592.955,00 atau 71,70 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 3.479.536.810,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 1.496.333.727,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 342.092.800,00,00 dan terealisasi sebesar Rp 188.598.900,00 atau mencapai 55,13 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 469.331.100,00 dan terealisasi sebesar Rp 373.984.402,00 atau 79,68 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 127.238.300,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 185.385.502,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.195.848.050,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.387.102.467,00 atau mencapai 65,19 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.391.285.792,00 dan

terrealisasi sebesar Rp 2.358.052.791,00 atau 69,53 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 1.804.562.258,00 dan juga kenaikan realisasi sebesar Rp 1.029.049.676,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 929.236.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 566.030.625,00 atau mencapai 60,91 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 783.143.020,00 dan terealisasi sebesar Rp 466.176.331,00 atau 59,53 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 146.093.480,00 dan juga kenaikan realisasi sebesar Rp 99.854.294,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.442.219.746,00 dan terealisasi sebesar Rp 572.368.355,00 atau mencapai 39,69 %. Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 325.334.656,00 dan terealisasi sebesar Rp 279.840.877,00 atau 86,02%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 1.116.885.090,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 292.527.478,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 850.942.505,00 dan terealisasi sebesar Rp 847.267.000,00 atau mencapai 99,57 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 374.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 218.760.000,00 atau 58,41 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 476.442.505,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 628.507.000,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 636.447.106,00 dan terealisasi sebesar Rp 177.559.335,00 atau mencapai 27,90 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 573.655.329,00 dan terealisasi sebesar Rp 545.778.554,00 atau 95,14 %. Terjadi kenaikan anggaran

sebesar Rp 62.791.777,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 368.219.219,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

- **Program Pengelolaan Hutan (03)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp 112.009.940.674,00 pada Program Pengelolaan Hutan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 48.585.734.574,00 atau 43,38 %. Sedangkan pada tahun 2021 lalu, program ini dianggarkan sebesar Rp 245.092.289.426,00 dan terealisasi sebesar Rp 96.436.387.811,00 atau 39,35 %. Apabila dibandingkan, maka terdapat penurunan anggaran sebesar Rp 113.082.348.752,00 dan juga terjadi penurunan realisasi sebesar Rp 47.850.653.237,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

- ***Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 17.977.578.373,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.509.737.137,00 atau mencapai 41,77 %. Sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 76.961.488.009 dan terealisasi sebesar Rp. 34.570.376.846 atau 44,92 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 58.983.909.636,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 27.060.639.709,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

- ◆ **Sub Kegiatan Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.684.531.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.055.524.855,00 atau 55,79 %. Namun Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun ini dikarenakan Sub Kegiatan Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan tidak ada pada tahun anggaran 2022.

- ◆ **Sub Kegiatan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.666.397.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.168.213.259,00 atau 70,10 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pembagian

Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan tidak ada pada tahun anggaran 2021.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 16.311.181.373,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.341.523.878,00 atau mencapai 38,88 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 73.276.957.009,00 dan terealisasi sebesar Rp 32.514.851.991,00 atau 44,37 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 56.965.775.636,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 26.173.328.113,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

➤ ***Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.947.945.900,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.622.448.792,00 atau mencapai 66,53 %. Sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.394.974.900,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.477.794.940,00 atau 72,98 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 3.552.971.000,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 2.144.653.852,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.947.945.900,00,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.622.448.792,00 atau mencapai 66,53 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.394.974.900,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.477.794.940,00 atau 72,98 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 3.552.971.000,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 2.144.653.852,00. Hal ini dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

➤ ***Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.635.839.350,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.971.368.058,00 atau mencapai 78,20 %. Sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.917.100.121 dan terealisasi sebesar Rp. 5.521.527.828 atau 69,74 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 281.260.771,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 449.840.230,00. Hal ini terjadi

dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.209.345.600,00 dan terealisasi sebesar Rp 915.729.202,00 atau mencapai 75,72 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 710.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 388.896.700,00 atau 54,77 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 499.345.600,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 526.832.502,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.008.298.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 920.357.930,00 atau mencapai 91,28 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 310.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 103.358.302,00 atau 33,34 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 698.298.000,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 816.999.628,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.257.729.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.741.671.852,00 atau mencapai 84,16 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.474.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.778.150.621,00 atau 79,97 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 3.148.271.000,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 36.478.769,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

♦ **Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 519.417.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 361.384.600,00 atau mencapai 69,58 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.800.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.371.576.579,00 atau 76,18 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 1.280.983.000,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 1.010.191.979,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan

yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

♦ **Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.641.049.750,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.032.224.474,00 atau mencapai 62,90 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.622.700.121 dan terealisasi sebesar Rp. 879.545.626 atau 54,20 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 18.349.629,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 152.678.848,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

➤ ***Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 36.519.787.740,00 dan terealisasi sebesar Rp 8.050.349.918,00 atau mencapai 22,04 %. Sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 56.431.143.192,00 dan terealisasi sebesar Rp 12.248.442.469,00 atau 21,71 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 19.911.355.452,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 4.198.092.551,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

♦ **Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.575.228.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 858.322.614,00 atau 54,49 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) tidak ada pada tahun anggaran 2021.

♦ **Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.796.140.722 dan terealisasi sebesar Rp. 5.341.952.821 atau 20,71%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2022.

♦ **Sub Kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.989.784.240,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.034.142.304,00 atau 54,49 %. Sedangkan pada

tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.585.692.450,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.824.270.800,00 atau 24,05%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 18.404.091.790,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 3.209.871.504,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.230.098.920 dan terealisasi sebesar Rp 4.519.501.320 atau 86,41 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2022.

♦ **Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.954.775.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.157.885.000,00,00 atau 54,49 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.221.829.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 562.717.528,00 atau 25,33 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 6.732.946.500,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 1.595.167.472,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

➤ ***Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 33.573.988.371,00 dan terealisasi sebesar Rp 19.302.580.258,00 atau mencapai 57,49 %. Sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 96.754.556.245 dan terealisasi sebesar Rp. 38.891.923.188 atau 40,20%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 63.180.567.874,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 19.589.342.930,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

♦ **Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.380.388.450,00 dan terealisasi sebesar Rp 826.204.700,00 atau 59,85 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 189.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 113.487.600,00 atau 60,05 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 1.191.388.450,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 712.717.100,00. Hal ini

terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 981.642.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 806.710.134,00 atau 82,18 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.709.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.448.138.769,00 atau 84,72 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 790.758.000,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 641.428.635,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

♦ **Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 52.146.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 39.500.000,00 atau 75,75 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 108.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 90.557.500,00 atau 83,16 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 56.754.000,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 51.057.500,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.179.282.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.753.878.690,00 atau 70,35 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 14.177.188.700,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.858.653.136,00 atau 48,38 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 5.997.360.300,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 1.104.774.446,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 22.980.529.521,00 dan terealisasi sebesar Rp 11.876.286.734,00 atau 51,68 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 80.570.067.545,00 dan terealisasi sebesar Rp 30.381.086.183,00 atau 37,71 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 57.589.538.024,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp

18.504.799.449,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

➤ ***Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.150.964.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 636.778.320,00 atau mencapai 12,36 %. Sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.497.346.959 dan terealisasi sebesar Rp. 1.836.318.006 atau 73,53 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 2.653.617.041,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 1.199.539.686,00. Hal ini terjadi dikarenakan perubahan anggaran yang terjadi di bulan September sehingga waktu tidak mencukupi untuk mencapai target.

◆ **Sub Kegiatan Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 111.149.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 79.543.954,00 atau 71,57 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.370.632.559,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.211.431.716,00 atau 88,38 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 1.259.483.559,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 1.131.887.762,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

◆ **Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsinya**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.039.815.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 557.234.366,00 atau 11,06 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.126.714.400 dan terealisasi sebesar Rp 624.886.290 atau 55,46%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 3.913.100.600,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 67.651.924,00. Hal ini terjadi dikarenakan perubahan anggaran yang terjadi di bulan September sehingga waktu tidak mencukupi untuk mencapai target.

➤ ***Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 491.511.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 308.803.948,00 atau mencapai 62,83%. Sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 258.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 239.237.632,00 atau 92,41 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 232.611.000,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 69.566.316,00. Hal ini terjadi

dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 491.511.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 308.803.948,00 atau mencapai 62,83%. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 258.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 239.237.632,00 atau 92,41 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 232.611.000,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 69.566.316,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

➤ ***Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.712.325.940,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.183.668.143,00 atau mencapai 58,82 %. Sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 876.780.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 650.766.902,00 atau 74,22 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 2.835.545.940,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 1.532.901.241,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.202.039.940,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.428.459.043,00 atau mencapai 64,87 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 407.310.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 223.275.072,00 atau 54,82 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 1.794.729.940,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 1.205.183.971,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 593.525.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 367.014.100,00 atau 61,84 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih tidak ada pada tahun anggaran 2021.

♦ **Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 916.761.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 388.195.000,00 atau mencapai 42,34 %. Sedangkan pada

tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 469.470.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 427.491.830,00 atau 91,06 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 447.291.000,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 39.296.830,00. Hal ini terjadi dikarenakan perubahan anggaran yang terjadi di bulan September sehingga waktu tidak mencukupi untuk mencapai target.

- **Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (04)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp 1.681.530.750,00 pada Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 1.337.233.283,00 atau 79,52%. Sedangkan pada tahun 2021 program ini dianggarkan sebesar Rp 4.526.788.600,00 dan terealisasi sebesar Rp 552.143.752,00 atau 12,20 %. Apabila dibandingkan, maka terdapat penurunan anggaran sebesar Rp 2.845.257.850,00 dan juga terjadi penurunan realisasi sebesar Rp 785.089.531,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

- ***Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 917.454.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 798.797.358,00 atau mencapai 87,07 %. Sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.907.488.600,00 dan terealisasi sebesar Rp 97.659.221,00 atau 2,50 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 2.990.034.100,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 701.138.137,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

- ◆ **Sub Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 478.055.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 385.190.411,00 atau mencapai 80,57 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.801.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 0 atau 0 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 3.323.145.000,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 385.190.411,00. Hal ini terjadi dikarenakan sub kegiatan ini baru dilaksanakan tahun ini.

♦ **Sub Kegiatan Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 145.704.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 143.867.109,00 atau mencapai 98,74 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 106.288.600,00 dan terealisasi sebesar Rp 97.659.221,00 atau 91,88 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 39.415.900,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 46.207.888,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 293.695.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 269.739.838,00 atau mencapai 91,84 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi tidak ada pada tahun anggaran 2021.

➤ ***Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 764.076.250,00 dan terealisasi sebesar Rp 538.435.925,00 atau mencapai 70,47 %. Sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 619.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 454.484.531,00 atau 73,39 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 144.776.250,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 83.951.394,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 51.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 33.697.100,00 atau mencapai 91,84 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 59.530.675,00 atau 59,53 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 48.300.000,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 25.833.575,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

♦ **Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 712.376.250,00 dan terealisasi sebesar Rp 504.738.825,00 atau mencapai 91,84 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 519.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 394.953.856,00 atau 76,06 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 193.076.250,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 109.784.969,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (05)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp 31.031.406.328,00 pada Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 21.392.745.518,00 atau 68,94 %. Sedangkan pada tahun 2021, program ini dianggarkan sebesar Rp 40.644.411.176,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 17.264.230.139,00 atau 42,48 %. Apabila dibandingkan, maka terdapat penurunan anggaran sebesar Rp 9.613.004.848,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 4.128.515.379,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 31.031.406.328,00 dan terealisasi sebesar Rp 21.392.745.518,00 atau mencapai 68,94 %. Sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.644.411.176 dan terealisasi sebesar Rp. 17.264.230.139 atau 42,48 %. Apabila dibandingkan, maka terdapat penurunan anggaran sebesar Rp 9.613.004.848,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 4.128.515.379,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ◆ **Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 12.455.355.600,00 dan terealisasi sebesar Rp 10.160.935.215,00 atau mencapai 81,58 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp15.457.186.680,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.733.471.170,00 atau 43,56%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 3.001.831.080,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 3.427.464.045,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya

kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.796.993.583,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.377.531.615,00 atau mencapai 49,56 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 12.300.255.346,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.855.345.758,00 atau 39,47 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 7.503.261.763,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 2.477.814.143,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

♦ **Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 13.779.057.145,00 dan terealisasi sebesar Rp 8.854.278.688,00 atau mencapai 49,56 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.886.969.150 dan terealisasi sebesar Rp 5.675.413.211 atau 44,04 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 892.087.995,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 3.178.865.477,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

• **Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (06)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp 2.385.054.500,00 pada Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 1.160.555.270,00 atau 48,66 %. Sedangkan pada tahun 2021, program ini dianggarkan sebesar Rp 1.303.750.000,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 1.117.339.399,00 atau 85,70 %. Apabila dibandingkan, maka terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp 1.081.304.500,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 43.215.871,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

➤ ***Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.385.054.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.160.555.270,00 atau mencapai 48,66 %. Sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.303.750.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.117.339.399 atau 85,70 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp

1.081.304.500,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 43.215.871,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 453.697.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 257.611.000,00 atau 56,78 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS tidak ada pada tahun anggaran 2021.

♦ **Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.280.099.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 400.912.770,00 atau mencapai 31,32 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 833.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 648.356.400,00 atau 77,76 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 446.349.500,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 247.443.630,00. Hal ini terjadi dikarenakan perubahan anggaran yang terjadi di bulan September sehingga waktu tidak mencukupi untuk mencapai target.

♦ **Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 567.239.600,00 dan terealisasi sebesar Rp 429.675.700,00 atau mencapai 75,75 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 199.992.000,00 atau 99,99%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 367.239.600,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 229.683.700,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

♦ **Sub Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS**

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 84.018.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 72.355.800,00 atau mencapai 86,12 %. Sedangkan pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 270.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 268.990.999,00 atau 99,63 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 185.981.600,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp 196.635.199,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- Petunjuk teknis yang seringkali berubah.
- Faktor cuaca yang tidak mendukung seringkali dijumpai saat melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*).
- Personil teknis yang baru dan belum berpengalaman
- Dana Bagi Hasil (DBH SDA DR) yang baru keluar pada bulan September

BAB IV KEBIJAKAN AKUTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), tia bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2 Basis Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2022 dan berakhir 31 Desember 2022. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013. Melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Aplikasi ini dipergunakan untuk perencanaan dan penganggaran (penyajian evaluasi penganggaran Mendagri)

- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

Aplikasi ini dipergunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan).

- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)

Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.

- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)

Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2 Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1 Pendapatan – LRA

- **Defenisi**

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- **Pengakuan**

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah di terima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- Pengukuran

Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima.

Pendapatan diklasifikasikan menjadi pendapatan pajak daerah, restibusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

4.4.2.2 Belanja

- Defenisi

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam perioda tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- Pengukuran

Belanja dicatat sebesar nilai bruto yang telah dikeluarkan

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.

4.4.2.3 Pendapatan - LO

- Defenisi

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- **Pengukuran**

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila pendapatan-LO yang diterima berupa barang/jasa dinilai sebesar harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- **Penyajian**

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4 Beban

- **Defenisi**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam perioda pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- **Pengakuan**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- **Pengukuran**

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada perioda tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

- **Penyajian**

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Hibah
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang

- Beban Lain-Lain

4.4.2.5 Aset

- **Defenisi**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu:

1. Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang pajak, piutang retribusi, piutang lainnya, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka, persediaan dan asuransi dibayar dimuka.

2. Aset non lancar

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset non lancar. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

- **Pengakuan**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan di peroleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

- **Pengukuran**

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antar jenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- Kas dan setara diukur sebesar nilai nominalnya
- Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (Frist in First out).
- Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka tia dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang)

- Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/sosial di tahun mendatang,
- Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya
- Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat di kapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi:
 - a. Menambah kapasitas/volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
 - b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terpenuhi, yaitu:
Perolehan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000 ke atas dan
Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas.
- Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
- Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

- **Penyajian**

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas

Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD
Kas di Bendahara FKTP
Kas di Bendahara BOS
Kas Lainnya
Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek Lainnya

Piutang Pendapatan

Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
Uang Muka
Panjar Kegiatan
Piutang Kelebihan Pungut Pph

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pendapatan
Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Dibayar Dimuka

Beban Pegawai Dibayar Dimuka
Beban Barang Dibayar Dimuka
Beban Jasa Dibayar Dimuka
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
Beban Lainnya Dibayar Dimuka

Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis
Persediaan Bahan/Material
Persediaan Barang Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir
Deposito Jangka Panjang
Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang

Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

4.4.2.6 Kewajiban

- **Defenisi**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- **Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- **Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- **Penyajian**

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarakan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

▪ **KEWAJIBAN**

▪ **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Pendapatan Diterima Dimuka
- Utang Beban
- Utang Jangka Pendek Lainnya

▪ **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

- Utang Dalam Negeri
- Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7 Ekuitas

- **Defenisi**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

- **Penyajian**

Ekuitas disajikan di Neraca dengan rincian sebagai berikut:

- **EKUITAS**
- EKUITAS
- Surplus/Defisit-LO
- Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

Sebagai entitas akuntansi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrua. Penyusunan Laporan ini juga telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2021.

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 50.650.000,00 atau sebesar 33,77 %. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan penerimaan di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Pendapatan terlampir. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 telah menargetkan 10 rincian obyek pendapatan, yaitu pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, Transfer pemerintah pusat, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan, Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya. (*mengikuti penerimaan yang ada pada skpd*). Rincian anggaran dan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut.

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
PENDAPATAN – LRA	-	-	-	-	-
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA</u>	-	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	-	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	150.000.000,00	50.650.000,00	33,77	0,00	100
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	-	-	-	-	-
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	-	-	-	-	-

Pendapatan secara total melampaui/tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat sebagian pendapatan yang melampaui target dan sebagian lagi tidak mencapai target. Adapun penjelasan dari masing-masing rincian obyek pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.1.1. Pendapatan pajak

Pendapatan pajak daerah adalah pendapatan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penarikan pajak sebagai salah satu pendapatan daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00 % dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi pajak daerah pada tahun 2022 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2021. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Pajak Air Permukaan	-	-	-	-	-
Pajak Rokok	-	-	-	-	-

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dari target sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari target sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00 %.
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari target sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %.
- Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Pendapatan Pajak Air Permukaan terealisasi dari target sebesar Rp terealisasi sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %.
- Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pendapatan Pajak Rokok terealisasi pada TA 2021 dari target sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %.

5.1.1.2. Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Penarikan retribusi sebagai salahsatu sumber pendapatan daerah didasarkan pada tiga peraturan daerah, yaitu:

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Jasa Umum
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Jasa Usaha
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi daerah yang dipungut oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 dari target sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.

50.650.000,00 atau 33,77 %, bila dibandingkan dengan tahun 2021 maka terdapat kenaikan sebesar Rp 0,00 atau 100 %. Penyebab tidak tercapainya target serta kenaikan antara tahun 2022 dan tahun 2021 akan dijelaskan terinci di penjelasan masing-masing rincian pendapatan. Secara garis besar retribusi terbagi menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, adapun rincian anggaran dan realisasi ketiga kategori pendapatan retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-	-
- Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-
- Retribusi Pengujian Kendaraan Diatas Air	-	-	-	-	-
- Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-	-	-	-
Retribusi Jasa Usaha	-	-	-	-	-
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp.150.000.000,00	Rp.50.650.000,00	33,77	Rp. 0,00	100
- Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	-	-	-
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	-	-	-	-	-
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-	-
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	-	-	-	-	-
- Retribusi Kartu Perpustakaan	-	-	-	-	-
- Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman	-	-	-	-	-
- Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi / Perlindungan Tanaman	-	-	-	-	-
- Retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi	-	-	-	-	-
Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-	-
- Retribusi Izin Trayek	-	-	-	-	-
- Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	-

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada TKA	-	-	-	-	-

5.1.1.2.2 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menargetkan memperoleh pendapatan dari tiga obyek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa umum dengan uraian sebagai berikut:

➤ Retribusi Pelayanan Kesehatan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

➤ Retribusi Pengujian Kendaraan Diatas Air

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi Pengujian Kendaraan Diatas Air kepada masyarakat.

➤ Retribusi Pelayanan Pendidikan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menarik retribusi pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

5.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menargetkan memperoleh pendapatan dari sembilan obyek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha dengan uraian sebagai berikut:

➤ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menarik retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kepada masyarakat atas layanan berupa Penyewaan Gedung Aula Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari target sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 50.650.000,00 atau 33,77 %, hal ini disebabkan sebagai berikut:

- Adanya Wabah Covid 19 (Virus Corona) yang mengakibatkan pendapatan sewa gedung / aula / gedung serba guna pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan dari target sebesar Rp. 150.000.000,00 hanya

terrealisasi sebesar Rp. 50.650.000,00 di karenakan menurunnya daya minat komnsumen untuk menyewa gedung / aula / ruang serba guna pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2022 tidak tercapai

Bila Pendapatan retribusi Rp. 50.650.000,00 tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 50.650.000,00 atau sebesar 100 %, hal ini disebabkan antara lain:

- Pada Tahun 2021 Tidak ada Izin dari Satgas Covid 19 Kota Samarinda

➤ **Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi Tempat Khusus Parkir kepada masyarakat.

➤ **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menarik retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa kepada masyarakat.

➤ **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah kepada masyarakat.

➤ **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga kepada masyarakat.

➤ **Retribusi Kartu Perpustakaan**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi Kartu Perpustakaan kepada masyarakat.

➤ **Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman kepada masyarakat.

➤ **Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi /Perlindungan Tanaman**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menarik retribusi Penggunaan Sarana Proteksi /Perlindungan Tanaman kepada masyarakat.

➤ **Retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi kepada masyarakat.

5.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi yang ditarik atas pemberian izin, permohonan, rekomendasi dan surat keterangan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menargetkan memperoleh pendapatan dari tiga obyek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha dengan uraian sebagai berikut:

➤ Retribusi Izin Trayek

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi Izin Trayek kepada masyarakat.

➤ Retribusi Izin Usaha Perikanan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi Izin Usaha Perikanan kepada masyarakat.

➤ Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada TKA

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menarik retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada TKA kepada masyarakat.

5.1.1.6. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengelola pencatatan Lain-Lain PAD yang sah. Penjelasan rinci atas Lain-Lain PAD yang sah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA
- Pendapatan Denda Pajak - LRA
- Pendapatan Denda Retribusi - LRA
- Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA
- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
- Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA
- Pendapatan dari Pengembalian
- Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA
- Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA
- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA
- Pendapatan BLUD - LRA
- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
- Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA
- Penerimaan Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga - LRA
- Penerimaan Hasil Kerjasama dengan PT. Kaltim Kariangau Terminal - LRA

5.1.2. elanja

Belanja yang ditargetkan sebesar Rp 530.308.468.030,00 terealisasi sebesar Rp. 245.281.233.199,28 atau sebesar 46,25 %. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 telah menargetkan dua jenis belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja	-	-	-	-	-
<i>Belanja Operasi</i>	332.061.191.267,00	226.406.181.827,13	68,18	197.578.909.658,00	14,59
Belanja Pegawai	159.121.089.262,00	97.419.522.602,00	61,22	102.848.891.524,00	5,28
Belanja Barang dan Jasa	172.940.102.005,00	128.986.659.225,13	74,58	94.730.018.134,38	36,16
Belanja Hibah	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
<i>Belanja Modal</i>	198.247.276.763,00	18.875.051.372,15	9,52	50.856.625.205,38	62,89
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.122.106.100,00	10.966.737.563,86	5,86	38.876.126.014,98	71,79
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.933.954.654,00	6.551.725.348,29	73,34	11.722.599.190,40	44,35
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.179.227.009,00	1.349.376.400,00	61,92	152.130.000,00	786,99
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.989.000,00	7.212.060,00	60,16	55.770.000,00	87,07

Belanja secara total dapat dikatakan mencapai/tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat sebagian belanja yang mencapai target dan sebagian lagi tidak mencapai target. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase terbesar diantara komponen jenis belanja yaitu sebesar 62,62 %. Dari target sebesar Rp. 332.061.191.267,00 terealisasi sebesar Rp 226.406.181.827,13 atau 68,18 %. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<i>Belanja Operasi</i>	332.061.191.267,00	226.406.181.827,13	68,18	197.578.909.658,00	14,59
Belanja Pegawai	159.121.089.262,00	97.419.522.602,00	61,22	102.848.891.524,00	-5,28
Belanja Barang dan Jasa	172.940.102.005,00	128.986.659.225,13	74,58	94.730.018.134,00	36,16

▪ Belanja Pegawai

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 159.121.089.262,00 untuk memberikan kompensasi kepada pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terrealisasi sebesar Rp. 97.419.522.602,00 atau sebesar 61,22 %.

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<u>Belanja Pegawai</u>	159.121.089.262,00	97.419.522.602,00	61,22	102.848.891.524,00	5,28
Belanja Gaji dan Tunjangan	83.064.369.274,00	39.518.023.008,00	47,58	43.738.051.524,00	9,65
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	72.722.849.988,00	54.792.949.594,00	75,34	55.702.278.000,00	1,63
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.333.870.000,00	3.108.550.000,00	93,24	3.408.562.000,00	8,80
Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-

Tersisanya anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 61.701.566.660,00 atau sebesar 37,78 % disebabkan oleh adanya beberapa pegawai yang pensiun, meninggal dunia dan pindah tugas ke SKPD lain atau Ke Pemerintah Provinsi lain.

▪ Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan sebesar Rp. 172.940.102.005,00 atau sebesar 52,08 %.

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<u>Belanja Barang dan Jasa</u>	172.940.102.005,00	128.986.659.225,13	74,58	94.730.018.134,00	36,16
Belanja Barang	39.368.190.497,00	26.318.971.977,00	66,85	-	-
Belanja Barang Pakai Habis	39.349.143.497,00	26.302.397.878,00	66,84	15.986.569.083,00	64,53
Belanja Barang Tak Habis Pakai	19.047.000,00	16.574.099,00	87,02	44.637.000,00	62,87
Belanja Jasa	36.979.942.552,00	30.628.321.395,00	82,82	-	-
Belanja Jasa Kantor	31.322.546.320,00	26.767.377.669,00	85,46	17.433.102.482,00	53,54
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.087.276.232,00	1.966.947.246,00	94,24	-	-
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	570.671.000,00	360.492.740,00	63,17	-	-
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	346.100.000,00	101.580.000,00	29,35	-	-
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	296.800.500,00	134.100.730,00	45,18	-	-
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.617.228.500,00	1.000.663.010,00	61,88	-	-
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	739.320.000,00	297.160.000,00	40,19	-	-
Belanja Pemeliharaan	19.920.529.456,00	11.419.183.616,13	57,32	10.119.086.016,00	12,85
Belanja Pemeliharaan Tanah	5.043.292.000,00	2.420.587.350,00	48,00	-	-
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.958.287.000,00	3.146.160.838,00	79,48	-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.873.029.420,00	2.719.777.960,13	70,22	-	-
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	280.923.036,00	253.824.038,00	90,35	-	-
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.764.998.000,00	2.878.833.430,00	42,55	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	76.593.389.000,00	60.542.996.237,00	79,04	46.918.181.708,00	29,04

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	76.593.389.000,00	60.542.996.237,00	79,04	-	-
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	78.050.500,00	77.186.000,00	98,89	-	-
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	78.050.500,00	77.186.000,00	98,89	-	-

Tersisanya anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. -43.953.442.779,87 atau sebesar 25,42 % disebabkan oleh terkendala oleh waktu.

5.1.2.2 Belanja Modal

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 198.247.276.763,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar Rp. 18.875.051.372,15 atau sebesar 9,52 %.

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Modal	198.247.276.763,00	18.875.051.372,15	9,52	50.856.625.205,38	62,89
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.122.106.100,00	10.966.737.563,86	5,86	38.876.126.014,98	71,79
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.933.954.654,00	6.551.725.348,29	73,34	11.772.599.190,40	44,35
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.179.227.009,00	1.349.376.400,00	61,92	152.130.000,00	786,99
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.989.000,00	7.212.060,00	60,16	55.770.000,00	87,07
Belanja Modal BLUD	-	-	-	-	-

Belanja modal sebesar Rp. 198.247.276.763,00 dipergunakan untuk menambah aset berupa:

- Peralatan Dan Mesin

- Gedung dan Bangunan
- Jalan,Irigasi, dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya

Masih tersisanya anggaran belanja modal sebesar Rp. 179.372.225.390,85 atau sebesar 9,52 % disebabkan oleh Waktu.

5.1.3. Pendapatan LO

Pada tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh pendapatan LO sebesar Rp 50.650.000,00, nilai ini jika dibandingkan dengan Pendapatan LO tahun 2021 sebesar Rp. 150.848.352,00 maka terdapat Penurunan sebesar Rp. 100.198.352,00 atau sebesar 66,42 %. Perbandingan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut.

Uraian	2021	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
PENDAPATAN - LO	50.650.000,00	150.848.352,00	66,42
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</u>	-	-	-
Pendapatan Pajak Daerah - LO	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	50.650.000,00	104.140.000,00	51,36
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	-	-	-
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	-	-	-
<u>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</u>	-	-	-
Pendapatan Lainnya - LO	-	46.708.352,00	100
<u>PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</u>	-	-	-
Pendapatan Luar Biasa - LO	-	-	-

5.1.3.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 memperoleh Pendapatan Pajak Daerah – LO sebesar Rp 0,00 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 0,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp. 0,00 Atau 0,00 % Rincian pendapatan pajak daerah - LO tahun 2022 kmparasian dengan tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Uraian	2021	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
Pajak Kendaraan Bermotor-LO	-	-	-
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	-	-	-
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	-	-	-
Pajak Air Permukaan-LO	-	-	-
Pajak Rokok-LO	-	-	-

- Pajak Kendaraan Bermotor-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor – LO.

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO.

- Pajak Air Permukaan-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Pendapatan Pajak Air Permukaan-LO.

- Pajak Rokok-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Pajak Rokok-LO.

5.1.3.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 memperoleh Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp 50.650.000,00. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 104.140.000,00, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 53.490.000,00 atau 51,36 %. Rincian pendapatan pajak daerah - LO tahun 2022 dikomparasikan dengan tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Uraian	2022	2021	% Naik (Turun)
--------	------	------	----------------

1	2	3	4=(2-3/3)
- Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	-	-	-
- Retribusi Pengujian Kendaraan Diatas Air-LO	-	-	-
- Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	-	-	-
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	50.650.000,00	104.140.000,00	51,36
- Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	-	-	-
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa-LO	-	-	-
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	-	-	-
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO	-	-	-
- Retribusi Kartu Perpustakaan-LO	-	-	-
- Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman-LO	-	-	-
- Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi / Perlindungan Tanaman-LO	-	-	-
- Retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi-LO	-	-	-
- Retribusi Izin Trayek-LO	-	-	-
- Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	-	-	-
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada TKA-LO	-	-	-

- Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Retribusi Pelayanan Kesehatan -LO
- Retribusi Pengujian Kendaraan Diatas Air-LO
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Diatas Air-LO
- Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO

Bila Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 53.490.000,00 atau sebesar 51,36 %, hal ini disebabkan Adanya Wabah Covid 19 (Virus Corona) yang mengakibatkan pendapatan sewa gedung / aula / gedung serba guna pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan dari target sebesar Rp. 150.000.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp. 50.650.000,00 di karenakan menurunnya daya minat komnsumen untuk menyewa gedung / aula / ruang serba guna pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2022 tidak tercapaiadanya wabah

- Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa-LO
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa-LO
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO
- Retribusi Kartu Perpustakaan-LO
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Pendapatan Retribusi Kartu Perpustakaan-LO
- Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman-LO
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Pendapatan Retribusi Pelayanan Sertifikasi,Pengujian, Pengujian Benih Tanaman-LO
- Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi /Perlindungan Tanaman-LO
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Pendapatan Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi/Perlindungan Tanaman-LO
- Retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi-LO
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Pendapatan Retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi-LO
- Retribusi Izin Trayek-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Pendapatan Retribusi Retribusi Izin Trayek-LO

- Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Pendapatan Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada TKA-LO
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada TKA-LO

5.1.3.3 Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur juga mengelola pencatatan Lain-Lain PAD yang sah-LO. Lain-lain PAD yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Adapun rincian Lain-Lain PAD yang Sah-LO dapat diuraikan sebagai berikut:

(menyesuaikan Pendapatan LRA di SKPD)

- Pendapatan Denda Pajak - LRA
- Pendapatan Denda Retribusi - LRA
- Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA
- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA
- Pendapatan BLUD - LRA
- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA

5.1.4 Beban LO

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2022 sebesar Rp. 225.737.009.123,82 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 223.996.316.530,64, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 1.740.692.593,18 Atau 0,78 %. Rincian Beban LO tahun 2022 komparasian dengan tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Uraian	2022	2021	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)

Uraian	2022	2021	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Beban LO			
Beban Operasional	225.737.009.123,82	223.996.316.530,64	0,78
- Beban Pegawai	97.419.522.602,00	102.848.891.524,00	5,28
- Beban Persediaan	26.920.119.167,69	15.457.022.670,64	74,16
- Beban Jasa	30.716.486.289,00	21.673.276.013,00	41,73
- Beban Pemeliharaan	10.137.884.828,13	10.100.848.016,00	0,37
- Beban Perjalanan Dinas	60.542.996.237,00	46.891.951.708,00	29,11
- Beban Penyisihan Piutang	-	104.140.000,00	100
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	26.920.186.599,00	100

5.1.4.1 Beban Operasi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menanggung beban operasi sebesar Rp. 225.737.009.123,82. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 223.996.316.530,64, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 1.740.692.593,18 atau 0,78%. Rincian Beban Operasi tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Bila Beban Pegawai tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 97.419.522.602,00 atau sebesar 5,28%, hal ini disebabkan antara lain:

- Kenaikan TPP
- Pembayaran TPP

5.1.4.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian persediaan untuk menunjang operasional pelayanan. Bila Beban Persediaan tahun 2022 dibandingkan

dengan tahun 2021 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 11.463.096.497,05 atau sebesar 74,16 %.

5.1.4.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan oleh pihak lain. Bila beban jasa tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 9.043.210.276,00 atau sebesar 41,73 %, hal ini disebabkan penambahan perangkat kerja sehingga berpengaruh terhadap beban jasa.

5.1.4.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas pemeliharaan aset yang dilakukan oleh pihak lain. Bila Beban pemeliharaan tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 maka terjadi kenaikan/penurunan sebesar Rp. 37.036.812,13 atau sebesar 0,37 %.

5.1.4.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi kepada pegawai atau nonpegawai yang melaksanakan tugas kedinasan yang kegiatannya diluar wilayah tempat kerjanya. Bila Beban perjalanan dinas tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 13.651.044.529,00 atau sebesar 29,11 %, hal ini disebabkan banyaknya bimbingan teknis dan sosialisai untuk pencegahan kebakaran hutan serta kenaikan anggaran tahun 2022.

5.1.4.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Beban Penyusutan belum bisa disajikan karena masih melakukan proses menghitung beban penyusutan akhir tahun dan Beban amortisasi (ATB) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak disajikan karena tidak ada pembelian Aset Tidak Berwujud.

5.1.4.1.7. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat kemungkinan tidak dapat tertagihnya piutang. Bila beban penyisihan piutang tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi kenaikan/penurunan sebesar Rp. 104.140.000,00 atau sebesar 100 %.

5.1.5. Aset

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset sebesar Rp. 303.896.252.828,73 pada tahun 2022. Bila dibandingkan dengan aset tahun lalu yaitu sebesar Rp. 277.660.366.903,27, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 26.235.885.925,46 atau 9,45 %. Rincian pendapatan aset tahun 2022 beserta komparasian dengan tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Uraian	2022	2021	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Aset	303.896.252.828,73	277.660.366.903,27	9,45
Aset Lancar	591.130.789,00	995.883.551,69	40,64
- Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-	155.572,00	100
- Kas di BLUD	-	-	-
- Kas Lainnya	-	-	-
- Piutang Pajak	-	-	-
- Piutang Bukan Pajak	-	-	-
- Piutang Retribusi	104.140.000,00	104.140.000,00	0
- Piutang Lainnya	-	-	-
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-104.140.000,00	-104.140.000,00	0
- Persediaan	591.130.789,00	995.727.979,69	40,64
- Belanja dibayar dimuka	-	-	-
Aset Non lancar	-	-	-
- Investasi Jangka Panjang	-	-	-
- Aset Tetap	300.368.078.935,73	273.727.440.247,58	9.73
- Aset Lainnya	2.937.043.104,00	2.937.043.104,00	0

5.1.5.1. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lancar sebesar Rp 591.130.789,00. Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp. 995.883.551,69, maka dapat diketahui terdapat

penurunan sebesar Rp. 404.752.762,69 Atau 40,64 %. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Pada akhir tahun 2021 tidak terdapat uang di Kas di Bendahara Penerimaan. Hal ini sesuai dengan dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbedaharaan Negara yang mengharuskan uang yang ada di bendahara penerimaan disetor paling lambat pada setiap akhir kerja.

5.1.5.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran telah menyetorkan seluruh sisa uang persediaan pada akhir tahun 2021, sehingga tidak terdapat sisa uang Kas di Bendahara Pengeluaran. Sesuai amanah 17. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/10552/2821-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Awal Tahun Anggaran 2023 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, bendahara keuangan harus sudah menyetorkan sisa uangnya sebelum tanggal 31 Desember 2022.

5.1.5.1.3. Kas di BLUD

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2005, pengelolaan kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus ditujukan dan mampu meningkatkan layanan kepada masyarakat. Badan Layanan Umum Daerah merupakan unit pemerintah yang memiliki fleksibilitas, di mana pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan tidak perlu disetor ke kas daerah.

5.1.5.1.4. Kas Lainnya

Rekening kas lainnya merupakan rekening kas yang dipergunakan untuk menyajikan nilai kas di sekolah. Nilai kas di sekolah per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00.

5.1.5.1.5. Piutang Pajak

Piutang pajak merupakan tunggakan pungutan pajak yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Nilai piutang pajak Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00.

5.1.5.1.6. Piutang Retribusi

Piutang retribusi merupakan tunggakan pungutan retribusi yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Nilai piutang retribusi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 104.140.000,00 bila dibandingkan dengan piutang retribusi tahun lalu yaitu sebesar Rp. 104.140.000,00 , maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan.

5.1.5.1.7. Piutang Lainnya

Piutang lainnya merupakan tunggakan pungutan diluar pajak dan retribusi yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Nilai piutang lainnya Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00.

5.1.5.1.8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengalokasian cadangan yang dibentuk dari piutang pada tahun 2022 sebesar Rp. 104.140.000,00 bila dibandingkan dengan penyisihan piutang tak tertagih tahun lalu yaitu sebesar Rp. 104.140.000,00, maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan.

5.1.5.1.9. Persediaan

Barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan ke masyarakat Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 591.130.789,00 bila dibandingkan dengan piutang lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp. 995.727.979,69, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 404.597.190,69 atau 40,63 %.

Persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat pada tahun ini sebesar Rp 316.545.000,00 yang terdiri dari:

- Peralatan dan Mesin
- Bahan/Bibit Tanaman

5.1.5.1.10. Belanja dibayar dimuka

Pada tahun 2022 Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membayar beberapa jasa atau fasilitas yang masa manfaatnya sampai dengan tahun 2022.

5.1.5.2. Aset Non lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset non lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset non lancar sebesar Rp 300.368.078.935,73 Bila dibandingkan dengan aset non lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp. 273.727.440.247,58, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 26.640.638.688,15 Atau 9,73 %. Perubahan nilai asset non lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.2.1. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset non lancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar Rp 300.368.078.935,73 Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp. 273.727.440.247,58, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 26.640.638.688,15 Atau 9,73 %. Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

Uraian	2020	Bertambah	Berkurang	2021	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	4=(5-23)
Aset Tetap	273.727.440.247,58	26.640.638.688,15	0,00	300.368.078.935,73	24,00
Tanah	26.230.997.872,17	6.295.080.000,00	0,00	32.526.077.872,17	4,04
Peralatan dan Mesin	266.102.207.813,48	10.748.495.971,86	0,00	276.850.703.785,34	8,70
Gedung dan Bangunan	112.190.103.701,93	9.755.629.142,29	0,00	121.945.732.844,22	28,65
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.655.430.544,00	1.906.959.986,00		8.562.390.530,00	-
Aset Tetap Lainnya	4.619.677.177,00	0,00	0,00	4.619.677.177,00	-72,90
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.833.544.227,00	0,00	2.065.526.412,00	768.017.815,00	-
Akumulasi Penyusutan	-144.904.521.088,00	0,00	0,00	-144.904.521.088,00	9,73

5.1.5.2.1.1. Tanah

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanah sebesar Rp 32.526.077.872,17 Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp. 26.230.997.872,17, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 6.295.080.000,00 Atau 24 %. Perubahan nilai tanah tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Penambahan

- Hibah : Rp. 6.295.080.000,00

(UPTD KPHP Santan)

(Aset yang baru dicatat berdasarkan surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur no. 028/3703/DK-I/2022 tanggal 25 Nopember 2022)

5.1.5.2.1.2. Peralatan dan Mesin

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peralatan dan mesin sebesar Rp 276.850.703.785,34 Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun lalu yaitu sebesar Rp. 266.102.207.813,48, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp.

10.748.495.971,86 Atau 4,04 %. Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Penambahan

Belanja Modal	:	Rp.	10.966.737.563,86
Reklasifikasi dari barang dan jasa			
UPTD KPHP Telake	:	Rp.	14.652.000,00
		Rp.	15.096.000,00
BJ Menjadi Aset Tetap	:		
UPTD KPHP Batu Ayau		Rp	5.680.000,00
UPTD KPHP Batu Rook		Rp	4.520.000,00
BM GU Dinas			
UPTD KPHP Meratus	:	Rp	1.636.000,00
UPTD KPHP Kendilo	:	Rp	1.545.000,00
UPTD KPHP SD Belayan	:	Rp	1.491.000,00

Pengurangan

Ekstrakomp	:		
Dinas Kehutanan		Rp	22.440.000,00
UPTD KPHP Batu Ayau		Rp	4.796.840,00
UPTD KPHP Santan		Rp	6.405.000,00
UPTD KPHP SD Belayan		Rp	31.191.000,00
UPTD KPHP Kendilo		Rp	20.900.000,00
UPTD KPHP Delta Mahakam		Rp	12.500.000,00
UPTD KPHP MMB		Rp	2.948.572,00
UPTD KPHP Telake		Rp	29.970.000,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap			
UPTD KPHL Balikpapan		Rp.	127.038.180,00

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000 keatas.
- Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas peralatan dan mesin yang nilai perolehannya sebesar Rp. 1.500.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (extracountable). Per 31 Desember 2022 nilai peralatan dan mesin yang termasuk dalam extracountable sebesar Rp. 131.151.412,00 Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin extracountable tahun lalu yaitu sebesar Rp. 359.971.118,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 228.819.706,00 atau 274,47 %.

5.1.5.2.1.3. Gedung dan Bangunan

Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki gedung dan bangunan sebesar Rp 121.945.732.844,22. Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 112.190.103.701,93, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 9.755.629.142,29. Atau 8.70 %. Perubahan nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Penambahan

- Belanja Modal	:	Rp.	6.551.725.348,29
- BJ Menjadi GB	:		
UPTD KPHP Berau Barat		Rp	138.510.000,00
		Rp	191.877.000,00
UPTD KPHP Kendilo		Rp	185.799.611,00
UPTD KPHP SD Belayan		Rp.	57.063.967,00
		Rp.	142.261.398,00
		Rp.	59.902.547,00
UPTD KPHP Berau Utara		Rp.	220.544.038,00
UPTD KPHP Berau Tengah		Rp.	195.611.897,00
- Aset yang baru dicatat			
UPTD KPHP Santan		Rp	356.172.000,00
- Reklasifikasi dari KDP	:		
UPTD KPHP Bengalon		Rp.	840.787.170,00
UPTD KPHP Berau Utara		Rp.	30.738.000,00
UPTD KPHP Berau Pantai		Rp.	92.161.107,00
UPTD KPHP Kelinjau		Rp.	631.087.974,00
UPTD KPHP Telake		Rp.	73.865.000,00
- Reklasifikasi dari JIJ			
UPTD KPHP Berau Pantai		Rp.	182.500.000,00
- Mutasi	:		
UPTD KPHP Batu Rook		Rp.	298.243.000,00

Pengurangan

- Reklasifikasi ke KDP	:		
UPTD KPHP Berau Barat		Rp.	52.003.500,00
UPTD KPHP Batu Ayau		Rp.	52.976.415,00
UPTD KPHP Kelinjau		Rp.	28.038.000,00
- Reklasifikasi ke JIJ			
UPTD KPHP Bengalon		Rp	16.760.000,00
UPTD KPHP SD Belayan		Rp.	6.400.000,00
- Mutasi	:		
UPTD KPHP Batu Ayau		Rp.	298.243.000,00
- Ekstrakomp			
UPTD KPHP SD Belayan		Rp.	6.400.000,00
		Rp.	12.600.000,00

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset gedung dan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan gedung dan bangunan yang bernilai Rp. 20.000.000 keatas.
- Nilai pemeliharaan gedung dan bangunan yang bernilai Rp. 50.000.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas gedung dan bangunan yang nilai perolehannya sebesar Rp. 20.000.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable). Per 31 Desember 2022 nilai gedung dan bangunan yang termasuk dalam ekstracountable sebesar Rp. 19.000.000,00 Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan ekstracountable tahun lalu yaitu sebesar Rp. 0,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 19.000.000 atau 0,00 %.

5.1.5.2.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 8.562.390.530,00 Bila dibandingkan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 6.655.430.544,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 1.906.959.986,00 Atau 28,65 %. Perubahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Penambahan

- Belanja Modal	:	Rp.	1.349.376.400,00
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin			
UPTD KPHL Balikpapan		Rp.	127.038.180,00
- Reklasifikasi dari KDP	:		
UPTD KPHP Bengalon		Rp.	619.801.076,00
- Reklasifikasi dari GB.	:		
UPTD KPHP Bengalon		Rp.	16.760.000,00
UPTD KPHP SD Belayan		Rp.	6.400.000,00
- Barang dan Jasa Menjadi JIJ	:		
UPTD KPHP SD Belayan		Rp.	59.980.330,00

Pengurangan

- Reklasifikasi ke GB	:		
UPTD KPHP Berau Pantai		Rp.	182.500.000,00
- Reklasifikasi ke KDP			
UPTD KPHP Kelinjau		Rp.	89.896.000,00

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bernilai Rp. 50.000.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.
- Atas gedung dan bangunan yang nilai pemeliharaannya sebesar Rp. 20.000.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable). Per 31 Desember 2021 nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang termasuk dalam ekstracountable sebesar Rp.0,00 Bila dibandingkan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan ekstracountable tahun lalu yaitu sebesar Rp. 0,00,

5.1.5.2.1.5. Aset Tetap Lainnya

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 4.619.677.177,00 Bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp. 4.619.677.177,00 , maka dapat diketahui tidak ada kenaikan/penurunan

5.1.5.2.1.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 768.017.815,00 Bila dibandingkan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 2.833.544.227,00, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 2.065.526.412,00 Atau 72,90 %. Perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Penambahan

- Reklasifikasi dari GB :

UPTD KPHP Berau Barat	Rp.	52.003.500,00
UPTD KPHP Batu Ayau	Rp.	52.976.415,00
UPTD KPHP Kelinjau	Rp.	24.038.000,00
- Reklasifikasi dari JIJ

UPTD KPHP Kelinjau	Rp.	89.896.000,00
--------------------	-----	---------------

Pengurangan

- Reklasifikasi ke GB :

UPTD KPHP Bengalon	Rp.	840.787.170,00
UPTD KPHP Kelinjau	Rp.	631.087.974,00
UPTD KPHP Telake	Rp.	73.865.000,00
- Reklasifikasi ke JIJ :

UPTD KPHP Bengalon	Rp.	619.801.076,00
--------------------	-----	----------------
- KDP yang sudah Selesai Pengerjaanya

UPTD KPHP Berau Utara	Rp.	30.738.000,00
UPTD KPHP Berau Pantai	Rp.	92.161.107,00

5.1.5.2.1.7. Akumulasi Penyusutan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menysihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomik aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. Pada akhir tahun 2022 akumulasi penyusutan atas aset tetap Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur belum bisa disajikan karena belum melakukan perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

5.1.5.2.2. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya sebesar Rp 2.937.043.104,00. Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp. 2.937.043.104,00, maka tidak terdapat kenaikan/ penurunan. Perubahan nilai aset lainnya tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.2.2.1. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya adalah kas yang hanya dapat digunakan untuk suatu tujuan tertentu atau dapat berubah menjadi kas (aset lancar) bila persyaratannya telah terpenuhi. Pada tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Kas yang Dibatasi Penggunaannya

5.1.5.2.2.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud yang terdapat pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan Software dan aset Tidak berwujud lainnya Pada tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tidak Berwujud sebesar Rp 240.790.000,00 Bila dibandingkan dengan Aset Tidak Berwujud tahun lalu yaitu sebesar Rp. 240.790.000,00, maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan.

5.1.5.2.2.3. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan kedalam aset lancar ataupun aset tetap atau aset lainnya. Aset yang termasuk dalam kategori ini meliputi dapat dijabarkan sebagai berikut:

➤ Aset Rusak Berat

Pada tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap yang kondisinya rusak berat sebesar Rp. 1.755.073.104,00. Bila dibandingkan dengan Aset Rusak Berat tahun lalu yaitu sebesar Rp. 1.755.073.104,00, maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan.

➤ Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Pada tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp. 1.181.970.000,00. Bila dibandingkan dengan Aset yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp. 1.181.970.000,00, maka tidak terdapat kenaikan/penurunan.

➤ Kredit Bibit Bergulir

Pada tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Kredit Bibit Bergulir sebesar Rp. 0,00. Bila dibandingkan dengan Kredit Bibit Bergulir tahun lalu yaitu sebesar Rp. 0,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %.

➤ Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat

Rekening ini merupakan akumulasi penyusutan atas aset-aset dalam kondisi rusak berat. Pada akhir tahun 2022 terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat sebesar Rp. 0,00. Bila dibandingkan dengan Kredit Bibit Bergulir tahun lalu yaitu sebesar Rp. 0,00, maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan.

5.1.6. Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi bernilai Rp. 41.843.007,00 per 31 Desember 2022. Pada akhir tahun 2022 terdapat kewajiban sebesar Rp. 41.843.007,00. Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu sebesar Rp. 31.151.473,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 10.691.534,00 atau 34,42 %. Penjelasan atas kenaikan/penurunan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.6.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 41.843.007,00. Bila dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek tahun lalu yaitu sebesar Rp. 31.151.473,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp. 10.691.534,00 atau 34,32 %.

5.1.6.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima pembayarannya namun jasa atau barang belum diberikan ke masyarakat atau pihak lain. Pada akhir tahun 2022 terdapat Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp. 0,00. Bila dibandingkan dengan Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu yaitu sebesar Rp. 0,00,

5.1.6.3. Utang Beban

Utang beban merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2021 terdapat Utang beban sebesar Rp. 41.843.007,00. Bila dibandingkan dengan Utang beban tahun lalu yaitu sebesar Rp. 31.151.473,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 10.691.534,00 atau 34,42 %.

5.1.7 Ekuitas

Kekayaan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 303.857.049.671,73. Nilai ini secara matematikatis merupakan selisih lebih dari aset atas kewajiban. Pada akhir tahun 2022 terdapat ekuitas sebesar Rp. 303.857.049.671,73. Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu sebesar Rp. 277.629.215.430,27, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 26.227.834.241,46 atau 9,45 %.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Struktur Organisasi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl. Kesuma Bangsa Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Sungai Pinang Kota Samarinda Dalam melaksanakan tugas pelayanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki sejumlah UPTD/B sebagai unit teknis yang langsung berhadapan dengan masyarakat saat pelayanan. UPTD/B tersebut beralamat sebagai berikut:

- UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto memiliki wilayah/cakupan kerja yang meliputi Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kantor beralamat di Jl. Biola Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Dadi Mulya kota Samarinda.

- UPTD KPHP Berau Barat.

UPTD KPHP Berau Barat dengan luas wilayah/ cakupan kerja adalah 786.021 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 234.305 Ha; Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 431.506 Ha; dan Hutan Produksi Tetap (HP) Seluas 114,210 Ha. Secara cakupan administrasi pemerintahan UPTD KPHP Berau Barat terletak dalam 4 wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dari 13 wilayah kecamatan di kabupaten Berau. Kantor beralamat di Jln. Pemuda no. 22 kode pos 77311 Kab. Berau Kalimantan Timur

- UPTD KPHP Bongan

UPTD KPHP Bongan dengan luas wilayah/ cakupan kerja adalah 335.745,59 Ha. Secara administrasi pemerintahan terletak dalam 3 wilayah Kabupaten, yaitu : Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Uatara dan Kabupaten Paser. Wilayah kerja KPHP Bongan berada pada 7 Kecamatan dan 26 desa/kampung. Kantor teletak Jl. Ahmad Yani No 1, Kel Klandasan Ilir, Balikpapan.

- UPTD KPHP Meratus

UPTD KPHP Bongan dengan luas wilayah/ cakupan kerja adalah penetapan Wilayah KPHP Meratus lintas 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabuaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten

Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang luasnya 387.488 ha. Dengan terbitnya SK.554/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, kemudian disesuaikan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 674/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur sehingga Luas KPHP Meratus berdasarkan hasil tata batas adalah 368.955 ha yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 1.371,70 ha; Hutan Produksi (HP) seluas 252.931,15 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 113.277,24 ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 1.374,41 ha. Kantor beralamat Jl. Marsma R Iswahyudi KM 10 Balikpapan.

➤ UPTD KPHP Kendilo

UPTD KPHP Kendilo dengan wilayah/ cakupan kerja meliputi Kawasan Hutan Das Sungai Kendilo dan Telake beralamat di Jl. Jendral Sudirman KM. 1 No. 09 Tanah Grogot Kabupaten Paser.

➤ UPTD KPHP Santan

UPTD KPHP Santan Luas dengan wilayah/ cakupan kerja didasarkan Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.674/Menhut-II/2011, Tanggal 1 Desember 2011 yaitu seluas 270.557 Ha. Kemudian disesuaikan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 718/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara dan peta perkembangan tata batas oleh BPKH wilayah IV Samarinda, sehingga Luas KPHP Santan adalah 267.068 Ha. Kantor beralamat Jl. Bangries No. 03 Samarinda 75125.

➤ UPTD KPHP Das Belayan

Penetapan Wilayah KPHP Sub DAS Belayan Sebagai KPH oleh Menteri Kehutanan, melalui surat Nomor : SK. 674/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur. KPHP Sub DAS Belayan mempunyai luas 1.033.151 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung ± 209.813,72 Ha; Hutan Produksi Terbatas (HPT) ± 531.382,49 Ha; Hutan Produksi Tetap (HP) ± 272.938,59 Ha; dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) ± 19.016,19 Ha. Kantor beralamat MT Haryono No. 30 Samarinda.

- UPTD KPHP Bengalon
UPTD KPHP Bengalon dengan wilayah/cakupan kerja meliputi 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kabuapten Kutai Timur Sangatta.
- UPTD KPHP Batu Ayau
UPTD KPHP Batu Ayau beralamat di Jl. Ahmad Yani RT.11 Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ulu Kabupaten/Kota Kutai Barat.
- UPTD KPHP Batu Rook
UPTD KPHP Batu Rook beralamat di Jl. Ahmad Yani RT.11 Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ulu Kabupaten/Kota Kutai Barat
- UPTD KPHP Berau Utara
UPTD KPHP Berau Utara beralamat di Jl. Anggur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau
- UPTD KPHP Berau Tengah
UPTD KPHP Berau Tengah beralamat di Jl. Anggur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau
- UPTD KPHP Berau Pantai
UPTD KPHP Berau Pantai beralamat di Jl. Anggur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau
- UPTD KPHP Manubar
UPTD KPHP Manubar dengan wilayah/cakupan kerja meliputi 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kabuapten Kutai Timur Sangatta.
- UPTD KPHP Kelinjau
UPTD KPHP Kelinjau dengan wilayah/cakupan kerja meliputi 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kabuapten Kutai Timur Sangatta.
- UPTD KPHP Delta Mahakam
UPTD KPHP Delta Mahakam beralamat di Jl. MT. Haryono No. 30 Samarinda.
- UPTD KPHP Damai

UPTD KPHP Damai beralamat di Jl. Ahmad Yani RT.11 Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ulu Kabupaten/Kota Kutai Barat

- UPTD KPHP Mook Manor Bulatn

UPTD KPHP Mook Manor Bulatn beralamat di Jl. Ahmad Yani RT.11 Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ulu Kabupaten/Kota Kutai Barat.

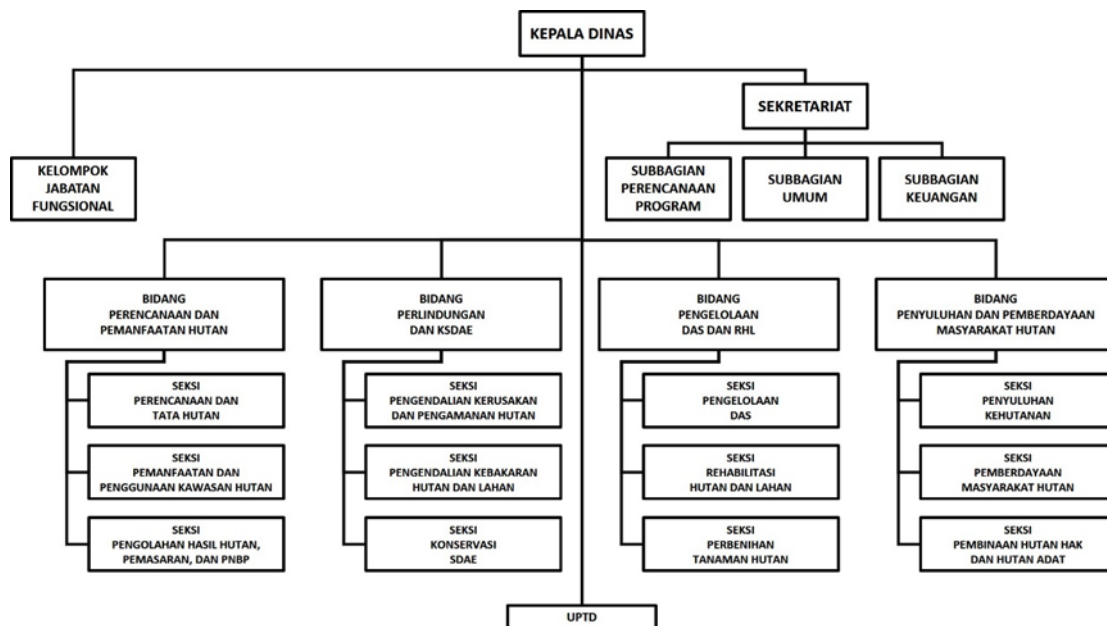
- UPTD KPHP Telake

UPTD KPHP Telake beralamat di Jl. Provinsi KM 25, kelurahan aru, Kecamatan Waru Kabupaten penajam Paser Utara.

- UPTD KPHP Balikpapan

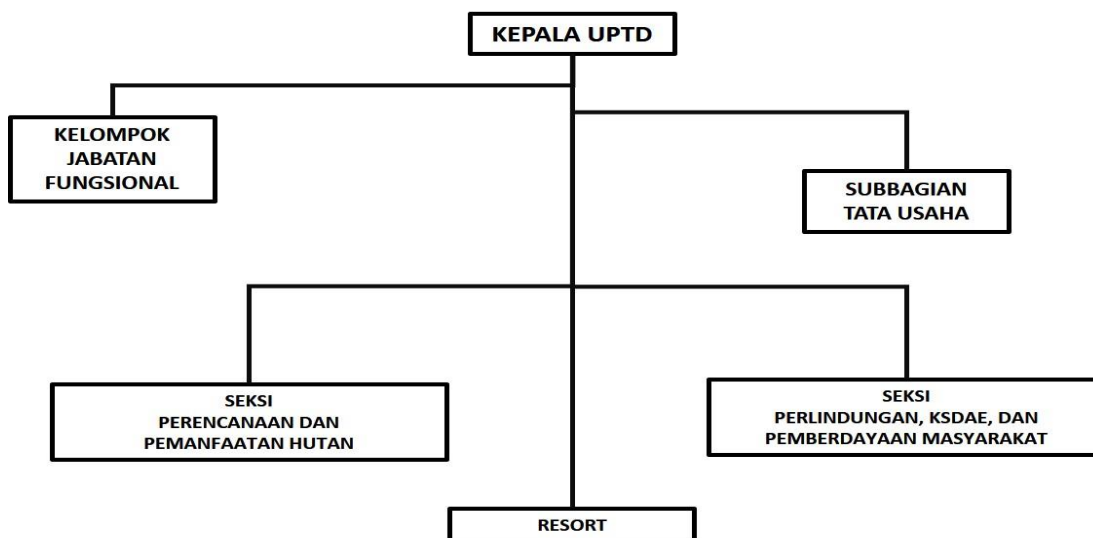
UPTD KPHP Balikpapan beralamat di Kelurahan Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antarpersonil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur secara garis besar terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris Dinas yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian (Perencanaan Program, Umum, dan Keuangan) serta 4 (Empat) Bidang yang masing – masing terdiri atas 3 (tiga) Seksi. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebgai berikut.



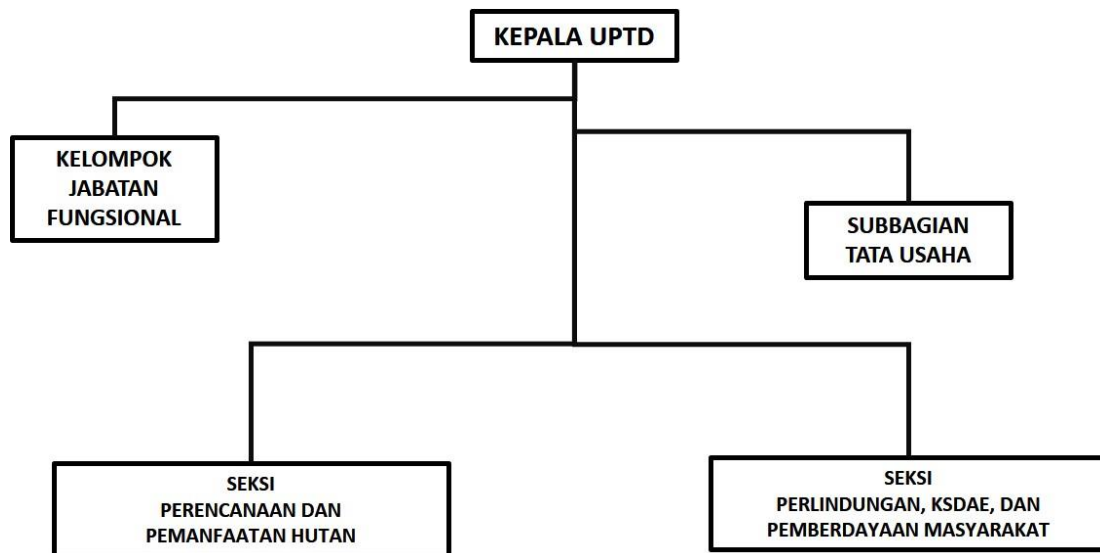
Gambar II-1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 69 Tahun 2016

Sementara berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016, tidak ada perbedaan struktur organisasi untuk keseluruhan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan, baik Produksi (KPHP) maupun Lindung (KPHL) Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dibantu Kepala Subbagian Tata Usaha serta Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat. Meskipun demikian, mempertimbangkan luas wilayah kelola UPTD KPH, maka jika dibutuhkan dapat dibentuk resort-resort untuk efektivitas kegiatan di lapangan, yang pelaksanaannya terdiri atas tenaga non struktural (Gambar II-2).



Gambar II-2. Struktur Organisasi UPTD KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016

Sedikit berbeda dengan struktur organisasi KPH, UPTD Tahura Bukit Soeharto tidak dilengkapi dengan resort-resort. Kepala UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto hanya dibantu Kepala Subbagian Tata Usaha dan 2 (dua) Seksi Pendukung yakni Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Seksi Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE), dan Pemberdayaan Masyarakat (Gambar II-3).



Gambar II-3. Struktur Organisasi UPTD Tahura Bukit Soeharto pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016

Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasional layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

6.2. Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi, hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*. Tugas dan fungsi masing-masing dinas dan UPTD/B dijabarkan sebagai berikut:

- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
 - Tugas yang mejadi tanggungjawab Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah tugas pokok secara struktural dijalankan oleh 12 Seksi yang

berada dalam 4 Bidang, serta operasionalisasinya juga dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Secara lebih detail, tugas pokok unit-unit kerja tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan bertugas: (1) merumuskan kebijakan teknis; (2) memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan, pada kegiatan tata hutan, rencana pengelolaan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kecuali Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), serta pemanfaatan hutan. Bidang ini membawahi 3 (tiga) Seksi dengan tugas masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

a. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, bimbingan teknis, dan evaluasi penatagunaan hutan, penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerjasama dan kemitraan, kelembagaan KPH, dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumberdaya hutan provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah provinsi.

b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan hutan produksi di wilayah provinsi;

- Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin penggunaan kawasan untuk kepentingan non kehutanan;
 - Menyiapkan bahan dalam pemberian pertimbangan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah provinsi.
- c. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak:
- Menyiapkan bahan dalam penilaian dan evaluasi perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun, dan perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam pengendalian dan pengawasan sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu dari industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan dan tertib peredaran hasil hutan di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan data dan bahan dugaan pelanggaran dan penyelesaiannya terhadap pelanggaran administratif usaha bidang kehutanan;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka penerapan sanksi administratif pelanggaran usaha kehutanan;
2. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya.

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya bertugas: (1) merumuskan kebijakan bersifat teknis; (2) memberikan pelayanan administrasi dan regulasi, pelaksanaan perlindungan hutan di Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP); (3) perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Tahura lintas Kabupaten/Kota; (4) perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) CITES; (5) pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Bidang ini terdiri atas 3 (tiga) Seksi dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

a. Seksi Pengendalian dan Pengamanan Hutan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan.

b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pembentukan forum kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- Monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan Tahura Kabupaten/Kota.

c. Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya:

- Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (Tahura) yang berada pada lintas daerah Kabupaten/Kota;
- Menyiapkan bahan dalam pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk *Appendix* CITES;
- Menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi areal dan pihak terkait dalam kawasan bernilai konservasi tinggi, pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam,

serta pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi;

- Monitoring dan evaluasi perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

3. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mempunyai tugas pokok: (1) merumuskan kebijakan teknis; (2) memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengelolaan DAS di provinsi dan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; dan (3) melaksanakan evaluasi mitigasi iklim dan emisi gas rumah kaca (GRK) urusan kehutanan. Bidang ini terdiri atas 3 (tiga) Seksi dengan tugas-tugas yang dijabarkan masing-masing sebagai berikut:

a. Seksi Pengendalian Daerah Aliran Sungai:

- Menyiapkan bahan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pembentukan forum pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS.

b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara;
- Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan rehabilitasi di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/ pesisir;

- Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan penyusunan standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis terkait kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi perencanaan aksi mitigasi iklim pada urusan kehutanan termasuk KPH;
 - Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan mitigasi iklim dan tingkat emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan.
- c. Seksi Pembenihan Tanaman Hutan:
- Menyiapkan bahan dalam rangka penetapan areal lokasi sumber daya genetik, perbenihan tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan bimbingan dan evaluasi pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, dan sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah provinsi.
4. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.
- Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan mempunyai tugas pokok: (1) merumuskan kebijakan bersifat teknis; (2) memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan, kegiatan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat, perhutanan sosial, dan promosi mitigasi iklim. Bidang ini terdiri atas 3 (tiga) Seksi dengan tugas masing-masing sebagai berikut:
- a. Seksi Penyuluhan Kehutanan:
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program dan materi penyuluhan di bidang kehutanan dalam provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam provinsi;

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan;
 - Menyiapkan bahan dalam promosi upaya mitigasi iklim urusan kehutanan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan:
- Menyiapkan bahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan) dalam provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam provinsi;
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dalam provinsi.
- c. Seksi Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat:
- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat, dan pengelolaan hutan adat, serta penanganan konflik tenurial;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dan pengembangan kerjasama/kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi;
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan adat dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi.
5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
- Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan hutan produksi (KPHP) dan/atau lindung (KPHL). Kepala UPTD KPH membawahi 2 (dua) seksi dengan tugas masing-masing sebagai berikut:
- a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan:

- Pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan hutan produksi dan/atau hutan lindung.
- b. Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat:
- Pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya serta pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan produksi dan/atau hutan lindung.
6. UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kehutanan Kaltim dalam penataan dan pengelolaan kawasan Tahura Bukit Soeharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto membawahi 2 (dua) Seksi dengan tugas sebagai berikut:

- a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan:
- Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan taman hutan raya.
- b. Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat:
- Pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya serta pemberdayaan masyarakat di kawasan taman hutan raya.

Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 8 (delapan) fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di provinsi, yaitu meliputi: tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL); rencana pengelolaan KPHP dan KPHL; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; pengolahan

- hasil hutan kayu; dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan religi;
3. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem di provinsi, meliputi: perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan Tahura lintas Kabupaten/Kota; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi; dan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
 4. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di provinsi;
 5. Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Kabupaten/Kota dan dalam Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;
 6. Pelaksanaan koordinasi dan kebijakan kehutanan di provinsi dengan instansi terkait lainnya di bidang kehutanan dan non bidang kehutanan;
 7. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur.
- Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya dijabarkan secara rinci dalam fungsi masing-masing Bidang sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Kaltim No. 69 Tahun 2016, serta fungsi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Tahura Bukit Soeharto sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016 dengan penjabaran fungsi dimaksud sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Guna menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;
- b. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan promosi, investasi, kerjasama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;

- c. Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
 - d. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi pada wilayah provinsi;
 - e. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah provinsi;
 - f. Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah provinsi;
 - g. Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah provinsi;
 - h. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah provinsi;
 - i. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan dalam wilayah provinsi;
 - j. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu;
 - k. Penyiapan penyelesaian sanksi terhadap pelanggaran administratif di bidang kehutanan di wilayah provinsi.
2. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya
- Guna menyelenggarakan tugas-tugas pokoknya, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya memiliki fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- b. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan Taman Hutan Raya (Tahura) lintas Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan dan pengendalian dalam rangka pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam daftar lampiran (*Appendix*) CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*/Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam);
- d. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi di provinsi.

3. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Guna menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) memiliki fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, dan evaluasi rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/ penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi;
- c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman hutan, sumber

daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan di dalam provinsi;

- d. Menyusun standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan;
- e. Melaksanakan koordinasi perencanaan aksi mitigasi perubahan iklim pada urusan kehutanan termasuk KPH;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan mitigasi perubahan iklim dan tingkat emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan.

4. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Guna melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan memiliki fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan bidang kehutanan dalam wilayah provinsi;
- b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, kemitraan kehutanan dalam provinsi;
- c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan perhutanan sosial yang meliputi: Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam provinsi;
- d. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi;
- e. Melaksanakan promosi upaya-upaya mitigasi perubahan iklim pada urusan kehutanan kepada seluruh pemangku kepentingan.

5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Guna melaksanakan tugas pokoknya, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan baik Produksi (KPHP) maupun Lindung (KPHL) menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan tata hutan pada wilayahnya;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
- d. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi;
- e. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam;

- f. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan hingga pengendalian;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan;
- h. Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan;
- i. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
- j. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- k. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan pengelolaan hutan;
- l. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- m. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. UPTD Tahura Bukit Soeharto

Guna melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, UPTD Tahura Bukit Soeharto menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional penataan dan pengelolaan Tahura;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional penataan dan pengelolaan Tahura;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penataan dan pengelolaan Tahura;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

➤ UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

Tugas pokok UPTD Tahura Bukit Soeharto yaitu melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan Tahura lintas Kabupaten/Kota dan melaksanakan urusan ketatausahaan. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019

tanggal 29 Mei 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Berau Barat

Tugas UPTD KPHP Berau Barat adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, KPHP Berau Barat selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Bongon

Tugas UPTD KPHP Bongon adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, KPHP Bongon selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Meratus

Tugas UPTD KPHP Meratus adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, KPHP Meratus selalu

berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Kendilo

Tugas UPTD KPHP Kendilo adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, KPHP Kendilo selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Santan.

Tugas UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Das Belayan

Tugas UPTD KPHP Das Belayan adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, UPTD KPHP Das Belayan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Bengalon

Tugas UPTD KPHP Bengalon adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, UPTD KPHP Bengalon selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Batu Ayau

Tugas UPTD KPHP Batu Ayau adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

➤ UPTD KPHL Batu Rook

Tugas UPTD KPHP Batu Rook adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

➤ UPTD KPHP Berau Utara

Tugas UPTD KPHP Berau Utara adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHP Berau Tengah

Tugas UPTD KPHP Berau Tengah adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHP Berau Pantai

Tugas UPTD KPHP Berau Pantai adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHP Manubar

Tugas UPTD KPHP Manubar adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHP Kelinjau

Tugas UPTD KPHP Kelinjau adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

➤ UPTD KPHP Delta Mahakam

Tugas UPTD KPHP Delta Mahakam adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHP Damai

Tugas UPTD KPHP Damai adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHP Mook Manor Bulatn

Tugas UPTD KPHP Mook Manor Bulatn adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHP Telake

Tugas UPTD KPHP Telake adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHL Balikpapan

Tugas UPTD KPHL Balikpapan adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki*. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing

6.3. Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Dinas XXX Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusialah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di Dinas XXX Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Jabatan	Pendidikan							
	S3	S2	S1	D III	D II	SMA	SMP	SD
Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	-	3	-	-	-	-	-	-
Kepala UPTD	-	16	3	-	-	-	-	-
Kepala Sub Bidang	-	24	33	-	-	-	-	-
Staf	-	28	193	66	1	166	11	6
Jumlah	-	72	229	66	1	166	11	6

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, Januari 2022
Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur ,

H. JOKO ISTANTO,S.P.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19750807 200003 1 003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2021
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2021 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU NIHIL
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2021 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2021
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Pendapatan s.d 31 Desember 2021 (jika terdapat Pendapatan)
Lampiran VII	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2021
Lampiran VIII	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga yang menghasilkan Pendapatan (jika ada)
Lampiran IX	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga atau Kontrak Belanja yang menghasilkan Aset Tidak Berwujud (jika ada)
Lampiran X	Rekap tagihan Belanja tahun 2021 yang ditagih / dibayar tahun 2023 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XI	Rekap Pendapatan-LO hasil retribusi & pendapatan lainnya selain pajak tahun 2021 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XII	Rekap Pendapatan-LO tahun 2021 yang belum diterima kasnya sampai dengan akhir tahun 2021 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIII	Rekap Penjualan Aset-Aset hasil lelang tahun 2021 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIV	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 desember 2021 dengan tanggal cetak diatas 31 desember 2021 dengan Validasi Bank
Lampiran XV	Berita Acara penutupan Kas akhir tahun 2021 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVI	Register Penutupan Kas akhir tahun 2021 (yang telah diotorisasi)

- Lampiran XVII Rekap Piutang dan Penyisihannya bila terdapat piutang (yang telah diotorisasi)
- Lampiran XVIII Rekap Utang bila terdapat Utang (yang telah diotorisasi)
- Lampiran XIX Rekap Belanja barang habis pakai tahun 2021 yang jadi Persediaan (yang telah diotorisasi)
- Lampiran XX Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 desember 2021 (yang telah diotorisasi)
- Lampiran XXI Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2021 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
- Lampiran XXII Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 desember 2021 yang sesuai dengan butir 8 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
- Lampiran XXIII Rekap Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3 jika ada (yang telah diotorisasi)
- Lampiran XXIV Rincian Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3 jika ada (yang telah diotorisasi)
- Lampiran XXV Foto copy berita acara serah terima barang yang telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tahun 2021
- Lampiran XXVI Rekapitulasi sewa dibayar dimuka/Asuransi dibayar dimuka (yang telah diotorisasi)
- Lampiran XXVII Laporan Mutasi Kontruksi dalam pengerjaan
- Lampiran XXVIII Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2021 (berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan bidang BMD BPKAD)
- Lampiran XXIX Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal (Format untuk SKPD akan disesuaikan)